

SKRIPSI

**CAPABILITY GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN
PASAR INDUK MINASA MAUPA SUNGGUMINASA
DI KABUPATEN GOWA**

Disusun dan disusulkan oleh :

ABD. RAHMAN

Nomor Stambuk : 105640202914



14/09/2021

1 exp
smb. Alumni

R/0125/IPM/21CD
RAH
c'

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

**CAPABILITY GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN
PASAR INDUK MINASA MAUPA SUNGGUMINASA
DI KABUPATEN GOWA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan



Disusun dan diusulkan oleh :

ABD. RAHMAN

Nomor Stambuk : 105640202914

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

PERRSETUJUAN

Judul Skripsi : Capability Governance Dalam Pengembangan
Pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa
di Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Abd. Rahman

Nomor Stambuk : 10564 02029 14

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM


Hamrun, S.IP., M.Si

Mengetahui :

Dekan

Ketua Program Studi

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Pemerintahan




Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM. 730727


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

NBM. 1031102

PENERIMA TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0202/FSP/A.3-VIII/VIII/43/2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Kamis 26 Agustus 2021.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Abd. Rahman
Nomor Stambuk : 10564 02029 14
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 26 Mei 2021

Yang Menyatakan,



Abd. Rahman

ABSTRAK

ABD. RAHMAN.2021. Capability Governance Dalam Pengembangan Pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa di Kabupaten Gowa (dibimbing oleh Hj. Nurmaeta dan Hamrun).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapabilitas pemerintah dalam pengembangan pasar induk Minasa Maupa serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan pasar induk Minasa Maupa Sungguminasa Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menganalisis jawaban dari informan yang berjumlah 6 orang yang diwawancarai kemudian menarik kesimpulan akhirdari hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas *governance* dalam pengembangan pasar induk Minasa Maupa Sungguminasa adalah : (a) *thinking ahead* yaitu budaya pedagang yang selalu ingin dekat dengan konsumen salah satu faktor penyebab banyaknya berdagang diluar pasar sehingga menyebabkan banyaknya lods didalam pasar yang tidak terpakai. (b) *thinking again* yaitu pemerintah masih kesulitan dalam menangani para pedagang yang berjual di luar pasar padahal masih banyak kios kosong. Sehingga menuntun pemerintah mengatur jadwal operasi pedagang yang berjual di luar pasar. (c) *thinking across* yaitu strategi pemerintah dalam pengembangan pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa, pemahaman pencapaian tujuan belum dapat dikatakan dapat dipahami secara menyeluruh namun opsi startegi yang dapat dimunculkan dalam penelitian ini yaitu membangun pasar Bontorea di daerah Pallangga dengan ruang atau lods terbuka untuk mengantisipasi masalah pedagang yang berjual di luar pasar karena ingin dilihat atau dekat dengan konsumen. Faktor pendukung pengembangan pasar induk Minasa Maupa Sungguminasa Kabupaten Gowa diantaranya : (1) menyediakan fasilitas umum, (2) Penerangan, (3) Pusat informasi, (4) Akses informasi harga yang terbuka, dan (5) Kinerja tim pengelola pasar. Selain itu pengembangan pasar induk Minasa Maupa juga memiliki faktor penghambat yang sering menghambat dalam proses kegiatan ini, yakni: (1) akses perbankan belum ada (ATM), (2) Daya tampung pasar padat dikarenakan banyaknya pedagang dan (3) Karakter pedagang yang selalu ingin berdagang diluar pasar.

Kata Kunci : Pengembangan pasar.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan memanjatkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan taufik-Nya jualah sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Capability Governance Dalam Pengembangan Pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa di Kabupaten Gowa” dapat diselesaikan.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana ilmu pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

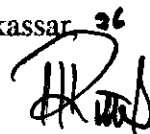
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga terkhusus kepada dosen pembimbing Ibu Dra.Hj.Nurmaeta,MM sebagai pembimbing I dan Bapak Hamrun, S.IP.,M.Si sebagai pembimbing II, yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan kenikmatan intelektual yang tak ternilai harganya. Semoga Allah SWT menggolongkan upaya – upaya beliau sebagai amal kebaikan.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis tak lupa mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada :

1. Orang tua dan istri tercinta yang senantiasa medoakan dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof.Dr.H.Ambo Asse, M.Ag sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membina Universitas ini dengan sebaik-baiknya.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina fakultas ini dengan sebaik-baiknya.
4. Ibu Dr.Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membina jurusan ini dengan sebaik-baiknya.
5. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah member bekal ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan dilembaga ini.
6. Segenap staf tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan pelayanan administrasi dan bantuan kepada penulis.
7. Segenap rekan – rekan civitas akademika Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.
Aamiin.

Makassar, 36 Mei 2021


Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kapabilitas <i>Governance</i>	9
C. Good Governance	9
D. Indikator Utama Kinerja Pemerintah	22
E. Pengembangan Pasar	27
F. Kerangka Pikir	32
G. Fokus Penelitian	34
H. Deskripsi Fokus Penelitian	34
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	35
B. Jenis dan Tipe Penelitian	35
C. Sumber Data	36
D. Informan Penelitian	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	38
G. Pengabsahan Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	41
B. Kapabilitas Governance dalam Pengembangan Pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa Kabupaten Gowa.....	49
C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pengembangan pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa Kabupaten Gowa.....	56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bangan Kerangka Pikir	33
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	51



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Tabel Informan Penelitian	37
Tabel 4.1	Tabel Kapasitas Pasar	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan dibentuk dengan maksud untuk membangun peradaban dan menjaga sistem ketertiban sosial sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar dalam konteks kehidupan bernegara. Dalam perkembangannya, konsep pemerintahan mengalami transformasi paradigma dari yang serba negara ke orientasi pasar (*market or public interest*), dari pemerintahan yang kuat, besar dan otoritarian ke orientasi *small and less government*, egalitarian dan demokratis, serta transformasi sistem pemerintahan dari yang sentralistik ke desentralistik.

Perkembangan organisasi dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan, hal ini disebabkan dengan oleh berkembangnya perubahan dinamika yang ada dalam masyarakat terkait dengan kompleksnya sinegi antara bidang sosial, politik, budaya dan ekonomi sehingga keberadaan organisasi menjadi komponen yang sangat dominan sebagai pencerminan suatu masyarakat modern.

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk.

Sehubungan dengan itu, sebuah konsep baru yang semula diperkenalkan lembaga-lembaga donor internasional, yaitu konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sekarang menjadi salah satu kata kunci dalam wacana untuk membenahi sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Konsep ini pertama diusulkan oleh Bank Dunia (World Bank), United Nations Development Program (UNDP), Asian Development Bank (ADB), dan kemudian banyak pakar di negara-negara berkembang bekerja keras untuk mewujudkan gagasan-gagasan baik menyangkut tata-pemerintahan tersebut berdasarkan kondisi lokal dengan mengutamakan unsur-unsur kearifan lokal.

Lahirnya *good governance* pada era awal Tahun 1990-an, oleh Organisasi Internasional khususnya yang bergerak dalam bidang bantuan keuangan dan pembangunan, telah menerapkan konsep baru sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan keuangan dan bantuan bagi negara-negara yang membutuhkan. Diterapkannya konsep *good governance* sebagai syarat oleh lembaga-lembaga donor misalnya PBB, Bank Dunia maupu IMF dalam memberikan bantuan pinjaman modal menurut Kjoer dan Klavs Kinnerup dilatar belakangi oleh tiga faktor yaitu : pertama pengalaman yang dimiliki oleh lembaga-lembaga donor dalam mengimplementasikan program peningkatan struktural (*Structural Adjustment Programmes*) bahwa memperkuat kapasitas dari lembaga-lembaga pemerintah adalah sangat diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan yang stabil; kedua setelah berakhirnya perang dingin dan jatuhnya sistem ekonomi dan politik negara

komunis yang menunjukkan bahwa terlalu besar jumlahnya aparatur negara dan tidak efisien dari aparatur negara tersebut bisa berimbas pada kegagalan ekonomi; ketiga, perkembangan ekonomi yang luar biasa terhadap negara Jepang si aktif negara sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi.

Persaingan dalam dunia perekonomian yang di tandai dengan adanya pasar global, birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan yang lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat. Penerapan *good governance* pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan atau partisipasi langsung organisasi masyarakat sebagai kekuatan penyeimbang negara. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri. Hetifa (dalam M.Tahir 2017)

Dalam mewujudkan reformasi birokrasi secara sistemik diantaranya yang mencakup berbagai tataran mulai perbaikan kelembagaan dan SDM birokrasi, pemerintah menerbitkan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Undang-undang ini merupakan pondasi penting bagi pengembangan birokrasi yang modern, bersih dan berintegritas, profesional dan berkinerja tinggi di masa depan. Pelaksanaan UU ASN juga berperan

sebagai penyeimbang antara upaya pemerintah dalam mendorong profesionalisme ASN dengan tetap menjaga kepemimpinan politik efektif di birokrasi. Sekaligus sebagai pendorong bagi terwujudnya pola pikir Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai ASN yang terbaru dan bersifat reformis. Yaitu mampu menjadi abdi negara yang inovatif. Hal ini karena di dalam UU ASN disebutkan bahwa diklat/ pendidikan dan pelatihan dengan materi *skill* yang dibutuhkan adalah hak bagi setiap ASN untuk meningkatkan kualitas kinerjanya. Pelaksanaan UU ASN berperan untuk menciptakan pemimpin yang memiliki *mindset* sebagai abdi negara yang inovatif, sehingga benar-benar dapat dijadikan panutan.

Terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Pemerintah telah memiliki PP No.11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN sebagai turunan dari UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana saat ini Reformasi Birokrasi yang menjadi prioritas pemerintah guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang akuntabel, efektif, serta efisien salah satunya penerapan teknologi digital dalam sistem pemerintahan.

Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi di sektor pengelolaan dan pengembangan Pasar Tradisional Sentral Sungguminasa oleh Bupati Gowa Provinsi Sulawesi Selatan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 06 tahun 2016 tentang pengelolaan pasar tradisional, terkait dengan penentuan lokasi pasar yang kemudian menjadi masalah bagi masyarakat Sungguminasa dan sekitarnya adalah bahwa lokasi pasar tersebut sangat sulit untuk diakses dikarenakan jalur mobil pete-pete yang sudah tidak ada. Hal demikian

membuat para pembeli dan penjual enggan melakukan transaksi di dalam pasar yang telah disediakan.

Selain masalah di atas, masih sangat banyak masalah-masalah yang timbul dikarena relokasi pasar yang berujung pada kurang luasnya atau kapasitas lapak pedagang ataupun stand-stand yang dibangun terbilang menjadi lebih sempit. Hal demikian tetntunya membuat para pedagang enggan memasarkan barang dagangannya di stand-stand yang telah disediakan oleh pemerintah. Selain hal tersebut banyaknya pasar-pasar dadakan yang ada di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa membuat pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa semakin sepi pembeli. Terlebih lagi banyaknya minimarket-minimarket yang ada semakin bertambah membuat daya beli masyarakat berkurang dan terminal yang sudah tidak difungsikan lagi seperti dulu. Hal ini diperoleh melalui pengamatan atau observasi lapangan dan wawancara singkat dengan para pedagang di Pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa Kabupaten Gowa. Dengan demikian patut dan layak untuk diteliti guna mencari solusi yang tepat dalam pemecahan masalah tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk membahas dalam skripsi ini dengan judul : “*Capability Governance* dalam Pengembangan Pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa Kabupaten Gowa”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kapabilitas *Governance* dalam pengembangan pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa Kabupaten Gowa?
2. Apa faktor yang mendukung dan menghambat dalam pengembangan pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa Kabupaten Gowa ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kapabilitas Pemerintah dalam Pengembangan Pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa Kabupaten Gowa.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis
 - a. Sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk melakukan penelitian yang selanjutnya yang terkait dengan penelitian tentang pengelolaan dan pengembangan pasar tradisional.
 - b. Menambah wawasan tentang kapabilitas *governance* dalam pengembangan pasar tradisional sebagai syarat untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya.

2. Kegunaan praktis

- a. Sebagai referensi dalam pola pengelolaan dan pengembangan pasar tradisional. Baik jangka menengah maupun dalam jangka panjangnya.
- b. Memberikan wawasan dan pengetahuan praktis dalam melakukan manajemen pasar untuk meningkatkan taraf hidup sejahtera.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

Adapun hasil penelitian relevan yang sama dengan judul penelitian saya yaitu:

1. Penelitian oleh Muchlas M. Tahir, Zulfan Nahrudin, di dalam jurnal ini penelitiannya fokus pada strategi tata kelola. Sedangkan kalau penelitian saya fokus kepada tata kelola pengembangan pasar Induk Minasa Maupa dan faktor pendukung dan penghambat pengembangan pasar.
2. Penelitian oleh Utami Dewi, F. Winarni, di dalam jurnal ini penelitiannya fokus pada kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta terkait dengan penataan dan pengembangan pasar tradisional guna menghadapi maraknya pasar modern. Sedangkan kalau penelitian saya fokus kepada tata kelola pengembangan pasar Induk Minasa Maupa dan faktor pendukung dan penghambat pengembangan pasar.
3. Penelitian oleh Bani Astiti Asa Nugroho, Herbasuki Nurcahyanto, di dalam jurnal ini penelitiannya fokus pada strategi pengembangan pasar tradisional.

Sedangkan kalau penelitian saya fokus kepada tata kelola pengembangan pasar Induk Minasa Maupa dan faktor pendukung dan penghambat pengembangan pasar.

B. Kapabilitas Governance

Kapabilitas *governance* merujuk pada kemampuan organisasi dalam mendesain berbagai aktivitas dan pengelolaan sumber daya menjadi lebih efektif dalam berdasarkan hasil analisis perubahan lingkungan internal dan eksternal institusi. Teece dalam hal ini memaparkan bahwa “*dynamic capabilities is the firm’s ability to integrate, build, and reconfigure internal and external competencies to address, rapidly changing enviroment*” (Helfat dkk, 2006:2).

Menurut Amir (2011:86) menjelaskan bahwa kapabilitas ialah kemampuan mengeksploitasi secara baik sumber daya yang dimiliki dalam diri maupun di dalam organisasi, serta potensi diri untuk menjalankan aktivitas tertentu ataupun serangkaian aktivitas. Ibarat individu, belum tentu seorang yang memiliki bakat, misalnya pemain piano bisa bermain piano dengan baik. Ini sangat ditentukan dengan bagaimana ia mengembangkannya dengan latihan, dan belajar. Hal tersebut didukung oleh pendapat Robbin yang mengartikan bahwa kemampuan merupakan sebuah kapasitas yang dimiliki oleh tiap-tiap individu untuk melaksanakan tugasnya. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan merupakan suatu penilaian atau ukuran dari apa yang dilakukan oleh orang tersebut.

Menurut Sampurno (2011:40) kapabilitas merepresentasikan seperangkat sumber terintegrasi yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas penting. Kapabilitas atau kemampuan menyatu dalam pengetahuan dan keterampilan pekerja atau individu yang ada dalam perusahaan ataupun organisasi. Kapabilitas diartikan sebagai potensi untuk menjalankan aktivitas tertentu atau serangkaian aktivitas. Terkadang istilah “kecakapan” digunakan untuk merujuk pada kemampuan kita menjalankan aktivitas fungsional, sementara kapabilitas dianggap bagaimana mengkombinasikan berbagai kecakapan (Amir, 2011:88).

Komponen kapabilitas mencerminkan bagaimana pola pikir orang Singapura atas dasar tiga hal yaitu *thinking ahead*, *thinking again* dan *thinking across*. *Thinking ahead* menunjukkan kapasitas berpikir dalam merumuskan kondisi dimasa mendatang yang mungkin dapat berdampak pada kondisi dalam negeri. Sebaliknya, *thinking again* akan merefleksikan kemampuan dan keterbukaan untuk berkaca pada kebijakan sebelumnya, kemudian dievaluasi dan disempurnakan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan. Sementara, *thinking across* merupakan kemampuan dan keterbukaan wawasan dalam mempelajari pengalaman ide dan konsep aktor-aktor lain. (Kazim, dkk, 2015).

Untuk lebih jelasnya mengenai berfikir ke depan (*thinking ahead*), berpikir lagi (*thinking again*), dan berpikir lintas batas (*thinking across*) diuraikan (dalam Aminullah, 2014).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kapabilitas *governance* adalah sebuah konsep dewasa ini dalam mengukur sejauh mana potensi,

kemampuan, keahlian dan kapasitas pemerintah dalam proses pengelolaan manajemen sumber daya yang ada.

Dynamic governance menekankan pemerintah untuk dapat memperhatikan faktor eksternal lingkungan kebijakan. Kebijakan yang adaptif bukan hanya sekedar reaksi yang pasif terhadap tekanan eksternal namun pendekatan proaktif terhadap inovasi, kontekstualisasi, dan implementasi (Andhika, 2017: 93). Inovasi kebijakan berarti gagasan yang baru yang dimasukkan dalam kebijakan untuk mencapai hasil yang lebih baik dan berbeda. Namun bukan hanya tentang ide atau gagasan baru dalam bentuk kontekstual perencanaan saja, tetapi juga terkait dengan implementasi kebijakannya. Dengan *dynamic governance* dapat tercipta pemerintahan yang cepat, responsif dan inovatif dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan yang terjadi.

Dynamic governance dapat dipahami sebagai adanya saling ketergantungan antara budaya dan kapabilitas pemerintah, yang ditopang dengan kemampuan orang/aktor dan mekanisme atau proses yang baik, di mana interaksi antara pemerintah dengan lingkungan eksternalnya mampu untuk dapat merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang adaptif.

Budaya akan sangat mempengaruhi setiap aktivitas kegiatan pemerintah. Neo dan Chen (2007: 3) memberikan argumentasi tentang cara menjadi salah satu negara maju, budaya dapat bersinergi dengan kemampuan organisasi yang kuat sehingga menciptakan pemerintahan dinamis yang memungkinkan terjadinya perubahan.

Menurut Neo dan Chen (2007: 25) budaya mempengaruhi pemerintahan dalam tiga cara. *Pertama*, budaya membatasi (*constraints*) agenda dan proses dalam perumusan kebijakan. Isu-isu yang bertentangan dengan nilai dan prinsip budaya cenderung kurang dapat diterima atau dipertimbangkan dalam proses pengambilan kebijakan. *Kedua*, nilai-nilai budaya sering digunakan untuk mempertimbangkan pilihan kebijakan inovatif yang bertentangan (*confronts*). Efek dari adanya pertentangan antara pilihan kebijakan tersebut dengan nilai-nilai budaya ini mengakibatkan adanya hambatan atau bahkan tidak diterimanya kebijakan tersebut. *Ketiga*, nilai-nilai budaya mengkatalisasi atau mempercepat (*catalyzes*) para pengambil kebijakan untuk secara aktif mencari alternatif dan ide-ide yang selaras dan akan mempercepat tercapainya tujuan.

Kapabilitas menurut Neo dan Chen (2007: 29) bahwa kapabilitas dalam *dynamic governance* sebagai sikap, pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya organisasi yang digunakan untuk memahami dan melaksanakan tugas yang dikoordinasikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang paling utama ialah kemampuan pemimpin, di mana pemimpin memiliki kemampuan dan pengaruh yang besar untuk menggerakkan bawahan maupun stakeholder lainnya untuk melakukan perubahan. Ada tiga karakteristik kapabilitas dalam *dynamic governance* (Neo dan Chen, 2007: 30-44).

a. *Thinking Ahead* (Berpikir ke depan)

Yaitu merupakan kemampuan institusi pemerintah untuk mengidentifikasi perkembangan lingkungan dan kebutuhan masyarakat

dimasa depan, memahami implikasinya terhadap aktivitas dalam pencapaian tujuan organisasi serta mengidentifikasi berbagai strategi dan pilihan yang dibutuhkan untuk mengantisipasinya (Neo dan Chen, 2007 : 30). Adapun proses *thinking ahead* meliputi kegiatan : a) Mengeksplorasi dan mengantisipasi trend perkembangan dimasa depan yang mungkin berdampak signifikan terhadap tujuan kebijakan; b) Memahami perkembangan tersebut akan mempengaruhi capaian tujuan saat ini dan menguji keefektifan strategi; c) Menyusun strategi pilihan yang dapat digunakan untuk mempersiapkan ancaman yang muncul dan memanfaatkan peluang baru; dan d) Mempengaruhi pengambilan keputusan utama dan stakeholder untuk memikirkan isu-isu yang muncul secara serius dan melibatkan mereka dalam percakapan strategis tentang respon yang tanggap. (Neo dan Chen, 2007 : 34).

b. *Thinking Again* (Berpikir lagi)

Yaitu kemampuan institusi untuk memanfaatkan data aktual, informasi, pengukuran dan umpan balik terhadap masalah yang menghambat kinerja, meninjau berbagai turunan kebijakan dan program dari masa lalu untuk dicari jalan perbaikan kinerjanya (Neo dan Chen, 2007 : 36). Adapun proses *thinking again* meliputi : a) Meninjau dan menganalisis data kinerja aktual dan memahami *feedback* masyarakat; b) Menyelediki penyebab munculnya *feedback* atau fakta yang diamati, informasi dan perilaku, baik yang berhasil maupun gagal mencapai target capaian; c) Meninjau kembali strategi, kebijakan dan program untuk mengidentifikasi fitur dan

aktivitas mana yang berjalan baik dan yang tidak berjalan baik; d) Mendesain ulang kebijakan dan program, baik sebagian atau seluruhnya, sehingga kinerja dapat meningkat dan tujuan organisasi lebih terpenuhi; dan e) Menerapkan kebijakan dan sistem baru sehingga masyarakat dan pelanggan dilayani dengan lebih baik dan menikmati hasil yang bermakna. (Neo dan Chen, 2007 : 37).

c. *Thinking Across* (Berpikir lintas batas)

Yaitu kemampuan organisasi melintasi batas-batas tradisional untuk belajar dari pengalaman orang lain sehingga gagasan baru dapat diaopsi dan memungkinkan kebijakan dan program baru yang inovatif dicoba dan dilembagakan (Neo dan Chen, 2007 : 40). Sedangkan proses *thinking across* meliputi pada kegiatan : a) Mencari praktik terbaru dan menarik yang diadopsi dan diimplementasikan oleh organisasi lain dalam mengatasi masalah serupa; b) Merenungkan apa yang mereka lakukan, mengapa dan bagaimana mereka melakukannya, dan pelajaran yang diambil dari pengalaman tersebut; c) Mengevaluasi apa yang dapat berlaku dalam konteks lokal, mempertimbangkan keadaan dan kondisi unik, dan apa yang dapat diterima bagi penduduk lokal; d) Menemukan hubungan terbaru melalui pengkombinasian ide dengan gagasan baru lainnya sehingga menciptakan pendekatan yang inovatif dalam menangani isu-isu yang muncul; dan e) Mencocokkan kebijakan dan program sesuai dengan tuntutan kebijakan lokal dan kebutuhan masyarakat. (Neo dan Chen, 2007 : 41-42).

Ketiga kemampuan ini harus didukung oleh orang yang memiliki kemampuan (*able people*) dan harus dilakukan dengan proses yang cepat, tangkas dan baik/benar (*agile process*). *Able people* artinya adalah orang-orang yang dapat atau mampu melihat membaca masa depan berdasarkan fakta, gejala dan perkembangan masa kini ditambah proyeksi akibat perubahan global yang cepat. *Able people* juga bermakna orang yang memiliki kewenangan, karena banyak orang memiliki kemampuan seperti disebut di atas tetapi tidak memiliki kesempatan dan kewenangan (kewenangan formal/ kewenangan akademik). *Agile process* berkaitan dengan cara, mekanisme atau prosedur yang benar dalam melakukan *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across*, cara yang benar dimaksud adalah berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah tidak tercampur dengan kehendak pribadi atau terkontaminasi keinginan politik kelompok tertentu atau sekedar formalitas untuk menghabiskan anggaran.

Saat ini, semua Negara di dunia menghadapi lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan yang begitu cepat dan sulit diprediksi. Kemajuan yang diraih sekarang, tidak menjamin keberlangsungan hidup di masa depan. Bisa jadi, seperangkat prinsip, kebijakan dan praktek-praktek yang pada awalnya baik, *governance* yang statis dan mempertahankan status quo pada akhirnya akan membawa keadaan yang stagnan dan tidak berkembang. Tidak ada perencanaan yang hati-hati akan menjamin relevansi dan efektivitas *governance*, jika lembaga-lembaga pemerintahan tidak memiliki kapasitas untuk belajar, berinovasi dan berubah di tengah lingkungan global yang terus berubah dan sulit diprediksi (Neo & Chen, 2007, p. 1).

Tantangan lain yang dihadapi dunia saat ini adalah inovasi teknologi yang berjalan begitu cepat, telah mengakibatkan banyak kebijakan menjadi cepat usang (*obsolescence*) dan terbukanya peluang-peluang baru. Demikian halnya dengan kondisi perubahan di masyarakat itu sendiri, di mana semakin banyak dari mereka yang mengenyam pendidikan yang lebih baik (*well-educated*) dan berinteraksi secara intensif dengan perkembangan global, yang pada akhirnya menuntut untuk terlibat di dalam proses perumusan dan implementasi berbagai kebijakan Negara. Tidak kalah penting adalah berbagai permasalahan di masyarakat yang semakin kompleks, dengan dampaknya yang semakin tidak terduga serta hubungan kausal yang semakin rumit, membutuhkan penyelesaian yang multi-perspektif dan koordinasi dari multi-agency (Neo, 2019; Neo & Chen, 2007, pp. 6–8).

Dengan merujuk pengalaman Negara Singapura, Neo dan Chen meyakini bahwa untuk menghadapi beragam tantangan tersebut, Pemerintah menjadi elemen sentral. Pemerintah lewat lembaga-lembaganya memainkan peran dalam menciptakan kerangka hubungan antara pemerintah, masyarakat dan dunia bisnis, serta kondisi untuk dapat memfasilitasi atau sebaliknya, menghambat keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Meski Pemerintah tidak secara langsung menciptakan persaingan industri, namun dapat berperan sebagai *“a catalyst and a challenger in shaping the context and institutional structure that stimulates business to gain competitive advantages.”* (Neo & Chen, 2007, pp. 2– 3). Disinilah perlunya dinamisme Pemerintah. Pemerintah melalui lembaga-lembaganya yang dinamis menurut

Neo dan Chen (2007, p. 1) Pemerintah dapat mempengaruhi dan mengendalikan pembangunan ekonomi melalui beragam kebijakan, peraturan dan struktur-struktur kelembagaan yang memberikan insentif atau pembatasan atas beragam aktivitas yang beejalan. Dengan kata lain, kemampuan untuk memperbaiki dan beradaptasi secara terus- menerus merupakan kapasitas mendasar yang perlu dimiliki oleh Pemerintah (baca: lembaga-lembaga Pemerintah) jika ingin memiliki *sustained economic development and prosperity*.

C. Good Governance

1. Pengertian *Good Governance*

Kemunculan *governance* dipandang sebagai suatu alternatif cara pandang dalam memahami dinamika perubahan sosial, ekonomi dan politik. Terjadinya pergeseran kata *government* kepada *governance* tidak lepas dari peran World Bank dan United Nations Development Programme (UNDP) beserta lembaga donor Internasional lainnya yang mengembangkan istilah *governance* sebagai pendamping *government*. Pendamping di sini dimaksudkan bahwa yang berperan dalam suatu negara bukan hanya “*government*” atau pemerintah saja. Ada aktor-aktor lainnya yang ikut berperan atau mendampingi pemerintah. Istilah *governance* inilah yang kemudian menjadi populer digunakan oleh kalangan akademisi, pembuat kebijakan, birokrat maupun masyarakat.

Menurut World Bank, *good governance* ialah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan

dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran terhadap kemungkinan salah satu alokasi atau investasi, dan pencegahan korupsi baik yang secara politik maupun *administrative*, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Sedangkan menurut UNDP *good governance* menunjukkan suatu proses yang memposisikan rakyat dapat mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya sekedar dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integritas serta untuk kesejahteraan rakyatnya (Teguh, 2011: 22).

Berdasarkan definisi ini, dapat dipahami bahwa tata kelola pemerintahan dilambangkan sebagai proses pembuatan kebijakan yang jelas, terbuka dan bisa diprediksi (yakni melalui proses yang transparan): birokrasi yang diilhami oleh etos profesional; lembaga pemerintahan yang akuntabel atas tindakan-tindakannya; kemudian partisipasi masyarakat sipil yang kuat dalam masalah-masalah publik dan semua tindakan yang dilakukan didasari atas aturan hukum.

UNDP mendefinisikan *governance* sebagai penggunaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan negara. Di mana penekanan dari definisi ini adalah mengenai kewenangan, kekuasaan yang sah atau kekuasaan yang memiliki legitimasi pada aspek politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan negara. Dari ketiga aspek tersebut, UNDP merumuskan ke dalam tiga aktor yang berperan dalam *governance*, yaitu

negara atau pemerintah (*state*); sektor swasta atau dunia usaha (*private sector*); dan masyarakat (*civil society*).

Boon Siong Neo dan Geraldine Chen (2007: 52) *governance* merupakan penentuan berbagai kebijakan, institusi dan struktur yang dipilih, yang secara bersama mendorong untuk memudahkan interaksi ke arah kemajuan ekonomi dan kehidupan sosial yang lebih baik. *Governance* menjadi sebuah pilihan cara atau proses dalam merumuskan kebijakan untuk mewujudkan tujuan bersama.

Dengan memahami definisi *governance* dari berbagai pendapat di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa *governance* atau tata kelola pemerintahan merupakan mekanisme atau sistem pengelolaan urusan negara yang dilakukan oleh aktor-aktor baik dari pemerintah maupun non-pemerintah dengan segala kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, di mana mereka saling berinteraksi dalam pengambilan keputusan atau kebijakan secara kolektif serta dalam pengimplementasian kebijakan tersebut.

Dinamika perjalanan praktek pemerintahan yang senantiasa berhadapan dengan lingkungan dan harapan masyarakat yang juga menjadi pendorong berubahnya paradigma pemerintahan secara konseptual. Tuntutan terhadap perbaikan kinerja pemerintah membuat pemerintah mencari praktek yang tepat yang dapat memenuhi harapan masyarakat. Hal ini juga kemudian secara akademik melahirkan kajian-kajian tentang konsepsi implementasi pemerintahan yang dapat memenuhi harapan

masyarakat dan tuntutan lingkungan strategis tersebut. Konsep yang paling aktual dalam konteks ini adalah konsep *good governance*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur utama yang dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut UNDP terdiri atas tiga macam, yaitu *the state* (negara/pemerintah), *the private sector* (swasta), dan *civil society organization* (organisasi masyarakat). Hubungan di antara ketiga unsur utama dalam penyelenggaraan *governance* tentunya saling mempengaruhi, saling membutuhkan, atau bahkan saling ketergantungan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Widodo, 2008:110).

Maka dengan demikian, istilah *good governance* sering disebut dalam berbagai kesempatan dan dimaknai secara berlainan, bahkan menjadi konsep yang populer dalam banyak debat akademik dan politik kontemporer. Satu sisi ada yang memaknai *good governance* sebagai kinerja suatu lembaga pemerintahan, perusahaan atau organisasi kemasyarakatan. Istilah ini merujuk pada arti asli *governing* yang berarti mengarah-kan atau mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik dalam suatu negeri. Karena itu *good governance* dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan keseharian.

Dengan demikian ranah *good governance* tidak terbatas pada negara melalui birokrasi pemerintahan, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil yang di representasikan oleh organisasi non pemerintah seperti lembaga

swadaya masyarakat (LSM) dan juga sektor swasta singkatnya, tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik tidak selayaknya ditujukan hanya kepada penyelenggara negara atau pemerintahan, melainkan juga pada masyarakat diluar pemerintahan yang secara bersemangat menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

2. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Good governance awalnya digunakan dalam dunia usaha (*corporate*) dan adanya desakan untuk menyusun sebuah konsep dalam menciptakan pengendalian yang melekat pada korporasi dan manajemen profesionalnya, maka ditetapkan *good corporate governance*. Sehingga dikenal prinsip-prinsip utama dalam *governance corporate* adalah: transparansi, akuntabilitas, *fairness*, tanggung jawab, dan responsivitas. Prinsip-prinsip *good governance* diatas cenderung kepada dunia usaha, sedangkan bagi suatu organisasi publik bahkan dalam skala Negara prinsip-prinsip tersebut lebih luas menurut Universitas Sumatera Utara UNDP melalui LAN) menyebutkan bahwa adanya hubungan sinergis konstruktif di antara Negara, sektor swasta atau privat dan masyarakat yang disusun dalam sembilan pokok karakteristik *good governance*, yaitu: Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah menyimpulkan sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *clean and good governance*, (dalam Pohan, 2014) : partisipasi (*participation*), penegakan hukum (*rule of law*), tranparansi (*tranparency*), responsive (*responsiveness*), orientasi kesepakatan (*consensus orientation*), keadilan (*equity*), efektifitas

(effectiveness) dan efisiensi (*efficiency*), akuntabilitas (*accountability*), dan visi strategi (*strategic vision*).

D. Indikator Utama Kinerja Pemerintahan

Salah satu kelemahan dalam standard penilaian kinerja pemerintahan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, adalah orientasi teoritis atau paradigmatik yang masih mengarah kepada birokrasi klasik dan mengutamakan *means* (cara) dari pada *ends* (tujuan). Di masa mendatang, orientasi penilaian kinerja pemerintahan hendaknya mengikuti paradigma *reinventing government* atau *post-bureaucratic*, yang mengutamakan pengukuran kinerja pada hasil akhir atau tujuan serta visi organisasi, dan bukan pada kemampuan mendanai input dan menjalankan proses (lihat Gaebler dan Osborne, 1992). Dan pada saat ini tuntutan akan *good governance* menjadi semakin mendesak, sehingga nilai-nilai tersebut harus diakomodasikan dalam standard penilaian kinerja pemerintahan.

Salah satu pembahasan tentang *good governance* dapat ditelusuri dari tulisan J.S.Edralin (1997). *Governance* merupakan suatu terminologi yang digunakan untuk menggantikan istilah *government*, yang menunjukkan penggunaan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah kenegaraan. Istilah ini secara khusus menggambarkan perubahan peranan pemerintah dari pemberi pelayanan (*provider*) kepada *enabler* atau *facilitator*, dan perubahan kepemilikan yaitu dari milik negara menjadi milik rakyat. Pusat perhatian utama dari *governance* adalah perbaikan kinerja atau perbaikan kualitas. Istilah *good governance* dipromosikan oleh

beberapa agensi multilateral dan bilateral (JICA, OECD, GTZ) sejak tahun 1991, dengan memberikan tekanan pada beberapa indikator antara lain: (1) demokrasi, desentralisasi, dan peningkatan kemampuan pemerintah; (2) hormat terhadap hak asasi manusia dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku; (3) partisipasi rakyat; (4) efisiensi, akuntabilitas, transparansi dalam pemerintah dan administrasi publik; (5) pengurangan anggaran militer; dan (6) tata ekonomi yang berorientasi pasar.

Sementara itu, United Nations merumuskan indikator *good governance* yang meliputi: (1) kemampuan, yaitu kemampuan yang cukup untuk melaksanakan kebijakan dan fungsi-fungsi pemerintah, termasuk sistem administrasi publik yang efektif dan responsif; (2) akuntabilitas dalam kegiatan pemerintah dan transparan dalam pengambilan keputusan; (3) partisipasi dalam proses demokrasi, dengan memanfaatkan sumber informasi dari publik dan dari swasta; (4) perhatian terhadap pemerataan dan kemiskinan; dan (5) komitmen terhadap kebijakan ekonomi yang berorientasi kepada pasar.

UNDP hanya memberikan dua indikator *good governance* yaitu: (1) desentralisasi untuk meningkatkan pengambilan keputusan di tingkat lokal, dengan menekankan perbaikan nilai efisiensi, mempromosikan keadilan dalam pelayanan publik, peningkatan partisipasi di bidang ekonomi dan politik; dan (2) kerjasama antara pemerintah dengan organisasi-organisasi masyarakat. Di lain pihak, World Bank mengemukakan enam indikator antara lain: (1) akuntabilitas politik, dengan menguji tingkat penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan seorang eksekutif dengan menetapkan sistem pemilihan dan

batas waktu menduduki jabatan; (2) bebas untuk berkumpul dan partisipasi seperti di bidang keagamaan, asosiasi profesi, relawan dan media; (3) jaminan hukum seperti kesamaan perlakuan hukum, perlindungan dari campur tangan luar, eksploitasi terhadap lingkungan; (4) akuntabilitas birokrasi, yaitu menciptakan sistem untuk memonitor dan mengontrol kinerja dalam kaitannya dengan kualitas, inefisiensi, dan pengrusakan sumberdaya, dan transparansi dalam manajemen keuangan, pengadaan, akunting, dan pengumpulan sumber dana; (5) ketersediaan, validitas, dan analisis informasi; dan (6) manajemen sektor publik yang efektif dan efisien (Edralin, 1997: 146 – 147).

Semua nilai yang dituangkan dalam rubrik *good governance* ini nampaknya bersifat nilai-nilai universal dan sejalan dengan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam GBHN 1999-2004. Karena itu, nilai-nilai ini perlu dipromosi dengan harapan kualitas pemerintahan di Indonesia dapat disejajarkan dengan kualitas pemerintahan negara-negara lain yang menggunakan nilai-nilai tersebut sebagai acuan. Sebagian dari nilai-nilai tersebut telah diperhatikan oleh pemerintah R.I misalnya melalui perbaikan sistem politik yaitu dengan pemberlakuan undang-undang politik, promosi desentralisasi dan partisipasi lokal melalui undang-undang tentang otonomi daerah, perhatian yang serius terhadap hak asasi manusia (HAM), pemberian kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi, dan pengurangan peranan militer. Namun perhatian terhadap nilai-nilai lain masih dirasakan belum memuaskan seperti akuntabilitas birokrasi, transparansi dalam pengambilan keputusan, perlakuan hukum secara adil, dan kemampuan

yang memadai dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan formulasi kebijakan.

Sebaiknya nilai-nilai *good governance* diatas dibahas dan ditetapkan secara formal dan eksplisit dalam rangka pengukuran kinerja pemerintahan di Indonesia. Dengan demikian, kinerja pemerintahan di masa mendatang dapat diukur dari sampai seberapa jauh lembaga dan aparat pemerintahan telah mewujudkan nilai-nilai *good governance* dan secara nyata dirasakan oleh masyarakat. Misalnya dalam kaitannya dengan kondisi di Indonesia saat ini maka nilai-nilai *good governance* yang paling penting menggambarkan kinerja pemerintahan meliputi :

1. Visi strategis : apakah pemerintahan yang ada memiliki visi yang jelas, serta misi untuk mewujudkan visi tersebut.
2. Transparansi : apakah pemerintahan yang ada menyediakan informasi ke publik secara terbuka sehingga publik dapat mempertanyakan tentang mengapa suatu keputusan dibuat, atau apa kriteria yang digunakan, sehingga masyarakat publik dapat mengontrol, memonitor lembaga-lembaga publik beserta proses kerjanya.
3. Responsivitas : apakah pemerintahan yang ada cepat tanggap dalam melayani kepentingan dari semua stakeholders.
4. Keadilan: apakah pemerintahan yang ada telah memberikan semua orang kesempatan yang sama untuk memperbaiki kesejahteraannya.

5. Konsensus: apakah pemerintahan yang ada telah berperan dalam menjembatani berbagai aspirasi guna mencapai persetujuan bersama demi kepentingan masyarakat.
6. Efektivitas dan efisiensi: apakah pemerintahan yang ada telah memenuhi kebutuhan dengan memanfaatkan sumberdaya dengan cara yang paling baik, atau melalui manajemen sektor publik yang efisien dan efektif.
7. Akuntabilitas: para pemerintahan yang ada harus bertanggung jawab kepada publik dalam konteks kinerja lembaga dan aparatnya baik di bidang manajemen, organisasi, maupun di bidang kebijakan publik.
8. Kebebasan berkumpul dan berpartisipasi: apakah pemerintahan yang ada telah memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk berkumpul, berorganisasi, dan berpartisipasi secara aktif dalam menentukan masa depannya.
9. Dukungan aturan dan hukum: apakah pemerintahan yang ada telah menciptakan aturan dan hukum yang membentuk situasi dan kondisi yang aman dan tertib, serta kondusif bagi masyarakat.
10. Demokrasi: apakah pemerintahan yang ada mendorong proses demokrasi di masyarakat.
11. Kerjasama dengan organisasi-organisasi masyarakat: apakah pemerintahan yang ada telah bekerjasama atau mengikutsertakan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat dalam memecahkan masalah dan memberikan pelayanan publik.

12. Komitmen pada pasar: apakah pemerintahan yang ada mendorong kebijakankebijakan yang berorientasi pada pasar.
13. Komitmen pada lingkungan: apakah pemerintahan yang ada memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan.
14. Desentralisasi: apakah pemerintahan yang ada telah mengembangkan dan memberdayakan unit-unit kelembagaan lokal agar dapat mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan dan situasi lokal.

E. Pengembangan Pasar Induk Minasa Maupa

Pengelolaan dan pengembangan pasar tradisional di Kabupaten Gowa dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustri (Disperdastris). Dinas inilah yang memiliki kewenangan untuk menata dan mengembangkan keberadaan pasar tradisional di wilayah Kabupaten Gowa.

Disperdastris mempunyai fungsi pelaksanaan sebagian kewenangan daerah di bidang pengelolaan pasar. Saat ini terdapat lebih dari 15 ribu orang pedagang dan tersebar di 33 pasar tradisional se-Kabupaten Gowa masuk dalam koordinasi kerja Disperdastris. Untuk menjalankan fungsi secara optimal maka Disperdastris mempunyai lima tugas pokok:

- a. Merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kebijakan dibidang pengelolaan pasar.
- b. Melaksanakan pembinaan pedagang pasar.
- c. Melaksanakan pemungutan retribusi sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

- d. Melaksanakan pengendalian, dan pengawasan operasional pengembangan fasilitas pasar dan pemungutan pendapatan.
- e. Melaksanakan ketatausahaan dinas.

1. Manajemen Pasar

Istilah manajemen berhubungan dengan usaha untuk tujuan tertentu dengan jalan menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia dalam organisasi dengan cara yang sebaik mungkin. Setiap organisasi selalu membutuhkan manajemen karena tanpa manajemen yang efektif tidak ada usaha yang berhasil cukup lama. Tercapainya tujuan organisasi baik tujuan ekonomi, sosial, maupun politik, sebagian besar tergantung kepada kemampuan para manajer dalam organisasi yang bersangkutan.

Menurut John F. Mee, dalam (Pandji Anoraga 2009) manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal, demikian pula mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal baik bagi pimpinan maupun para pekerja serta memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat.

Menurut Mary Parker Follet, dalam (Khaerul Umam 2013) mengatakan bahwa manajemen adalah suatu seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang lain. Dari definisi ini tersirat bahwa para manajer mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara mengatur orang-orang lain untuk melaksanakan yang diperlukan dalam pekerjaan itu, bukan dengan cara melaksanakan pekerjaan itu oleh dirinya sendiri.

Pengembangan pasar merupakan sebuah usaha yang dilakukan dalam meningkatkan penjualan dari hasil produk yang dihasilkannya. Kegiatan ini merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan pertumbuhan produktivitas perusahaan. Menurut William J. Stanton, dalam (Danang Sunyoto, 2012) pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan.

2. Program Pengembangan Pasar Tradisional

Pasar sebagai tempat transaksi komoditas ekonomi kini telah beralih fungsi menjadi sarana rekreasi, yang dikemas dalam wisata belanja. Sehingga orang pergi berbelanja bukan sekadar hendak membeli komoditas (barangjasa) melainkan juga telah menjadi gaya hidup. Gaya hidup inilah yang belum mampu ditawarkan oleh pasar tradisional. Pasar tradisional masih tertinggal dan belum mampu menjadi tempat wisata belanja.

Program pengembangan pasar dimaksudkan untuk menata dan memajukan pasar tradisional sehingga mampu menjadi pusat wisata belanja. Program pengembangan pasar ini meliputi pemberdayaan pasar dan komunitas dan pengembangan dan pembuatan media promosi pasar.

Untuk mewujudkan visi menjadi pusat wisata belanja ada beberapa kebijakan dan program kegiatan yang hingga saat ini terus digalakkan oleh Disperdastri Kabupaten Gowa. Pemberdayaan pasar tradisional dilakukan dengan melakukan revitalisasi sarana dan prasarana fisik, peningkatan

kualitas barang dagangan dan pemberdayaan pelaku pasar. Pemberdayaan pasar dilakukan dengan meningkatkan kualitas pasar tradisional dan barang yang dijual di pasar tradisional. Kualitas pasar tradisional dari segi fisik saat ini sudah banyak dibenahi. Berbagai program revitalisasi pasar tradisional dilakukan dibawah pengawasan Disperdastris. Untuk Pasar Induk Minasa Maupa, misalnya, program revitalisasi dilaksanakan melalui berbagai macam cara, yaitu:

- a) Perbaikan infrastruktur pasar yaitu perbaikan atap, pembuatan drainase dan pemeliharaan bangunan pasar yang dilaksanakan pada bulan Juli 2012.
- b) Peningkatan kebersihan lingkungan Pasar Induk Minasa Maupa.
- c) Peningkatan pengamanan dan penertiban dengan menambah frekuensi patroli pasar oleh petugas keamanan dan ketertiban yang bekerja sama dengan kepolisian.
- d) Pembinaan dan pemberdayaan pedagang melalui peningkatan kemampuan pedagang dalam manajemen usaha, display barang dagangan, pelayanan konsumen, kualitas barang, stock barang dan ketepatan ukuran/timbangan.
- e) Pengembangan dan promosi pasar (Pratiwi, 2012).

Selain program revitalisasi pasar, pembentukan komunitas pasar merupakan suatu upaya bagi pemberdayaan pelaku pasar. Peran dan fungsi dari paguyuban tersebut antara lain sebagai wadah untuk aspirasi pedagang dan kemudian menjembatani komunikasi antara pedagang dengan pengelola

(Disperdastris dan Kepala Pasar), mempermudah distribusi informasi, wadah pengelolaan konflik internal pada level pasar dan pedagang, memfasilitasi kemudahan sistem peminjaman modal dari perbankan, serta menurunkan jumlah rentenir di pasar (penurunan rentenir pasar induk Minasa Maupa mencapai 75%).

Pengembangan dan pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Gowa juga kian tampak dengan membangun media aspirasi, media informasi, sekaligus sebagai media promosi pasar sebagai upaya untuk membangun pasar tradisional dengan berbasis komunitas pedagang pasar.

Program lain yang dilakukan untuk pengembangan dan pemberdayaan pasar adalah dengan menyelenggarakan Program Sekolah Pasar yang dilaksanakan awal Maret 2012 dan berlangsung di semua pasar di Kabupaten Gowa. Sekolah Pasar diharapkan mampu untuk mendorong pasar agar lebih mandiri, berkoperasi dan terkoneksi satu sama lain sehingga harapan ke depan pasar rakyat akan menjadi lebih maju. Program ini merupakan program kerja sama pemerintah dengan pedagang Pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa Kabupaten Gowa.

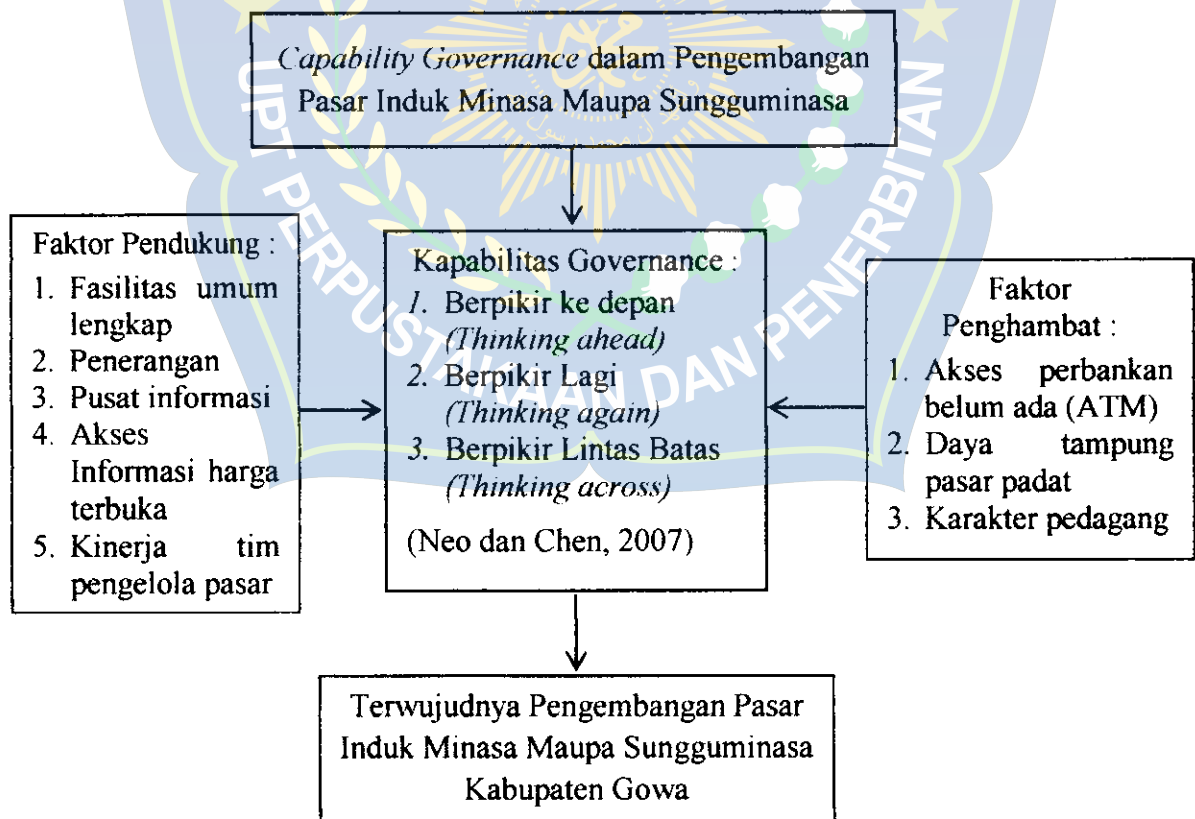
F. Kerangka Pikir

Kapabilitas *governance* dalam pengembangan pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa sangat berpengaruh bagi kepuasan pada pedagang dan masyarakat selaku konsumen. Tentunya dalam proses pengembangan ini didukung oleh beberapa faktor agar apa yang dikerjakan sesuai apa yang diharapkan. Namun tak jarang dalam setiap kegiatan pengembangannya tentu

memiliki beberapa penghalang yang dapat menghambat proses pengembangan pasar. Kondisi inilah yang kadang membuat pemerintah harus berpikir lagi dan mengulang kembali apa yang telah dikerjakan sebelumnya hingga akhirnya pengembangan pasar Induk Minasa maupa dapat terwujud.

Berdasarkan uraian di atas terkait Kapabilitas *governance* dalam pengembangan pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa di Kabupaten Gowa maka secara operasional penulis mengungkapkan melalui tiga indikator menurut Neo dan Chen (2007) yaitu *Thinking Ahead*, *Thinking Again*, dan *Thinking Across*. Untuk lebih lanjut dapat kita lihat pada skema kerangka pikir berikut :

Gambar 2.1 : Bagan kerangka pikir



G. Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu *capabilty governance* pengembangan pasar induk Minasa Maupa Sungguminasa dan faktor pendukung dan penghambat pengembangan pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa Kabupaten Gowa.

H. Deskriptif Fokus Penelitian

- a. *Thinking ahead* (berpikir kedepan) adalah rencana jangka panjang pemerintah terhadap suatu proses pengembangan pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa Kabupaten Gowa.
- b. *Thinking again* (berpikir lagi) adalah peninjauan kembali atau refleksi diri pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pengembangan pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa Kabupaten Gowa. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa dalam hal ini adalah melakukan evaluasi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan rencana pengembangan pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa Kabupaten Gowa.
- c. *Thinking across* (berpikir lintas batas) dalam hal ini adalah bagaimana pihak atau kelompok kepentingan yang ada mampu mengadopsi inovasi-inovasi, ide-ide baru dengan melakukan study banding terhadap proses pengembangan pasar yang ada sebagai acuan tata kelola atau manajemen pasar yang berkelanjutan.
- d. Kapabilitas adalah kemampuan atau keterampilan pemerintah dalam mengelola pasar induk Minasa Maupa.

- e. *Good governance* adalah tata kelola pasar Induk Minas Maupa sebagai wadah dalam menyediakan kebutuhan sehari-hari masyarakat.
- f. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam hal ini adalah faktor-faktor yang mendukung proses pengembangan pasar Induk Minas Maupa Sungguminasa Kabupaten Gowa.
- g. Faktor penghambat adalah faktor-faktor yang menghambat pengembangan pasar Induk Minas Maupa Sungguminasa Kabupaten Gowa.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan setelah seminar proposal, yakni dimulai pada bulan Februari 2021 sampai dengan Maret 2021. Lokasi penelitian ini terletak di Dinas Perdagangan dan Industri dan Pasar Induk Minasa Maupa Kabupaten Gowa. Alasan memilih lokasi tersebut karena kondisi pasar saat ini menarik untuk diteliti karena pasar induk Minasa Maupa merupakan pasar tradisional yang selalu dipadati para pedagang dan pengunjung setiap harinya.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan dan dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek yang akan diteliti, dalam hal ini terkait dengan tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian dengan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis terkait dengan objek yang akan diteliti demi memberi informasi dan data yang valid terkait dengan fakta dan fenomena yang ada di lapangan.

2. Tipe penelitian

Penelitian ini di dasari dengan maksud untuk menggambarkan secara deskriptif pengembangan pasar induk Minasa Maupa Sungguminasa

Kabupaten Gowa. Hal-hal tersebutlah yang menjadi fokus dan di kaji serta di analisis secara deskriptif kualitatif dalam penelitian ini.

C. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh data-data yang diperlukan selama peneliti melaksanakan penelitiannya.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang ada kaitannya dengan kapabilitas *good governance*.

2. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang tidak langsung didapatkan oleh pengumpul data. Data sekunder sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, dan bacaan serta dokumentasi atau file yang ada kaitannya dengan pelaksanaan penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah penunjukan langsung terhadap orang yang mengetahui lapangan/subjek yang diteliti. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini informan yang dipilih dianggap mampu memberikan informasi terkait latar belakang penelitian dan mengetahui persoalan yang diteliti. Dalam penelitian ini terdiri dari 6 informan yang dipilih karena dianggap mampu memberikan informasi terkait latar belakang penelitian dan mengetahui persoalan yang diteliti.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Inisial	Jabatan	Jumlah
1	Zainuddin Langke	MA	Kepala Pasar	1 Orang
2	Ma`ruf Alam, SE, MM	ZL	Disperdastr	1 Orang
3	Muh. Arzad	AR	Pedagang	1 Orang
4	Dg. Saing	DS	Pedagang	1 Orang
5	Hj. Lino	LN	Pembeli	1 Orang
6	Hj. Nani	NN	Pembeli	1 Orang
Total Informan				6 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap masalah-masalah yang terkait dengan Kapabilitas *governance* dalam pengembangan pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa di Kabupaten Gowa. Pengamatan ini bertujuan untuk memperoleh keterangan-keterangan data yang akurat dan relevan antara jawaban informan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan mengenai Kapabilitas *Governance* dalam Pengembangan Pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa di Kabupaten Gowa.

2. Wawancara

Teknik yang dilakukan melalui pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi ataupun ide melalui Tanya Jawab secara lisan dan mendalam terhadap beberapa infroman yang diambil sebagai sampel yang dianggap mampu memberikan informasi yang akurat terkait Kapabilitas

Governance dalam Pengembangan Pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa di Kabupaten Gowa.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen atau buku ataupun yang relevan dengan Kapabilitas *Governance* dalam Pengembangan Pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa di Kabupaten Gowa.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam penyusunan hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah interaktif (Sugiyono, 2018).

Adapun langkah yang peneliti gunakan dalam menganalisa data sesuai dengan prosedur dan tahapan-tahapan berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan pemilihan data dan pemusatan perhatian kepada data-data yang betul-betul dibutuhkan sebagai data utama dan juga data yang sifatnya hanya pelengkap saja. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.

2. Penyajian Data

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dipilah antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu dikelompokkan, kemudian diberikan batasan masalah.

3. Menarik Kesimpulan

Setelah melakukan penyajian data maka kesimpulan awal dapat dilakukan. Menarik kesimpulan juga dilakukan selama penelitian berlangsung. Sejak awal ke lapangan serta dalam proses pengumpulan data, peneliti berusaha melakukan analisis dan mencari makna dari yang telah terkumpulkan.

G. Pengabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data menggunakan teknik pengumpulan data serta pengecekan pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu peneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut :

1. Perpanjangan Masa Penelitian

Peneliti akan melakukan perpanjangan masa pengamatan jika data yang dikumpulkan dianggap belum cukup, maka dari itu peneliti dengan melakukan pengumpulan data, pengamatan dan wawancara kepada informan baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data

yang belum diperoleh sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti menghubungi kembali para informan dan mengumpulkan data sekunder yang masih diperlukan.

2. Pencermatan Pengamatan

Data yang diperoleh peneliti dilokasi penelitian akan diamati secara cermat untuk memperoleh data yang bermakna. Oleh karena itu, peneliti akan memperhatikan dengan secara cermat apa yang terjadi dilapangan sehingga dapat memperoleh data yang sesungguhnya.

3. Triangulasi

- a. Triangulasi Sumber yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan daya yang telah diperoleh sebelumnya.
- b. Triangulasi Teknik yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan bermacam-macam cara atau teknik tertentu untuk diuji keakuratan dan ketidakakuratannya.
- c. Triangulasi Waktu yaitu berkenan dengan waktu pengambilan data yang berbeda agar data yang diperoleh lebih akurat dan kredibel dari setiap hasil wawancara yang telah dilakukan pada informan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Pada sub bab ini menyajikan gambaran umum lokasi penelitian yang mencakup secara umum Kabupaten Gowa, Pasar Induk Minasa Maupa, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa.

1. Profil Dinas Perdagangan dan Perindustrian

a. Letak dan Luas Wilayah

Letak dan luar wilayah yang berada pada Kabupaten Gowa berada pada $12^{\circ}38.16'$ Bujur Timur dari Jakarta dan $5^{\circ}33.6'$ Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara $12^{\circ}33.19'$ hingga $13^{\circ}15.17'$ Bujur Timur dan $5^{\circ}5'$ hingga $5^{\circ}34.7'$ Lintang Selatan dari Jakarta.

Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros Kota Makassar dan. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai,. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto dan sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan salah satu daerah kabupaten tetangga yang saling membantu dan faktor ekonomi dan pertanian.

Kabupaten Gowa memiliki Luas wilayah 1.883,33 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan salah satu

wilayah yang sangat luas dari kabupaten lain seperti Bantaeng dan lainnya. Wilayah Kabupaten Gowa mempunyai 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 167 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.

Berdasarkan total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km² dan panjang 90 Km.

Di atas aliran sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi DAM Bili-Bili dengan luas + 2.415 Km² yang dapat menyediakan air irigasi seluas + 24.600 Ha, konsumsi air bersih (PAM)

untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar sebanyak 35.000.000 m³ dan untuk pembangkit tenaga listrik tenaga air yang berkekuatan 16,30 Mega Watt.

Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Gowa hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya musim kemarau dimulai pada Bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan dimulai pada Bulan Desember hingga Maret yang biasa di manfaatkan oleh masyarakat untuk bertani khususnya menanam padi. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu Bulan April-Mei dan Oktober-Nopember yang biasa di bulan ini selain digunakan untuk menanam padi bayak juga petani memanfaatkan untuk menanam sayuran, buah-buahan dan bayak lagi tanaman yang di tanam karna di musim ini curah hujan yang rendah atau jarang hujang di karenakan musim ini musim kemarau inilah bayak masyarat yang memanfaatkan untuk bertani.

Curah hujan di Kabupaten Gowa yaitu 237,75 mm dengan suhu 27,125°C. Curah hujan tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos pengamatan terjadi pada Bulan Desember yang mencapai rata-rata 676 mm, sedangkan curah hujan terendah pada Bulan Juli - September yang bisa dikatakan hampir tidak ada hujan.

b. Visi dan Misi

1. Visi

- a. Visi Kabupaten Gowa adalah terwujudnya masyarakat yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
- b. Visi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa adalah meningkatnya kualitas sektor industri dan perdagangan berbasis ekonomi.

2. Misi

Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa adalah :

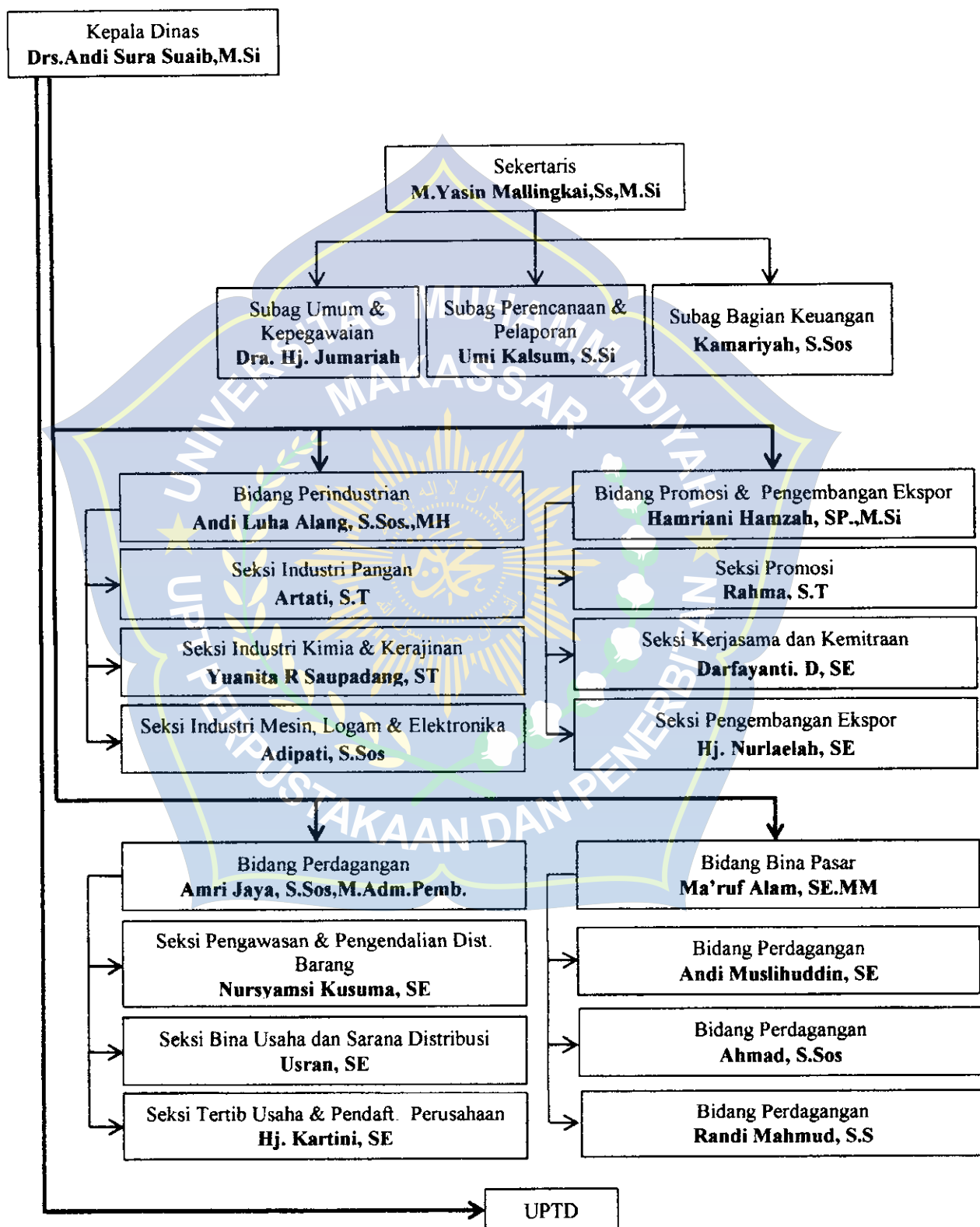
- a. Meningkatkan perdagangan yang efektif dan berkualitas.
- b. Meningkatkan potensi usaha mikro dalam penguatan kelembagaan dan perekonomian masyarakat.
- c. Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dengan menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya lokal serta optimalisasi pemanfaatan kawasan industri Kabupaten Gowa.
- d. Meningkatkan kualitas profesionalisme sumber daya aparatur dan disiplin kerja serta tata kelola.
- e. Menyiapkan data potensial yang akurat dengan pemanfaatan sistem informasi.

c. Struktur Organisasi

Berdasarkan Perda Nomor 25 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa, terakhir disempurnakan dengan Perda No.18 Tahun

2008 Maka struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Gowa Sebagai berikut :



2. Profil Pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa

a. Letak Geografis

Secara geografis Pasar Induk Minasa Maupa terletak di daerah perkotaan di Kabupaten Gowa, tepatnya terletak di Jalan Usman Salengke Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

Pasar Induk Minasa Maupa merupakan pasar yang terbesar di Kabupaten Gowa dengan batas wilayahnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros Malino.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Pallangga dan Jembatan kembar.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Swadaya.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tirta Jeneberang dan Sungai Jeneberang.

Pasar Induk Minasa Maupa terdiri dari 2 (dua) lantai dengan basement dan *rooftop* (atap) yang difungsikan sebagai *café* dan *food court*, serta parkir.

Pada basement pasar ini terdiri dari pedagang sayur 25%, pedagang barang campuran 15%, pedagang daging/ayam 10%, pedagang ikan 30%, pedagang buah 10%, dan pedagang pecah belah 10%.

Pada lantai 1 (satu) terdiri dari pedagang emas, hp, elektronik, dan aksesoris 30%, pedagang pakaian dan kain 20%, pedagang sepatu, sandal dan tas 20%, dan pedagang bebas 30%. Pada lantai 2 (dua) terdiri dari

pedagang sepatu, sandal dan tas 20%, pedagang pakaian dan kain 50%, dan pedagang bebas 30%.

b. Kapasitas Pasar

Pasar Induk Minasa Maupa mampu menampung sebanyak \pm 3000 pedagang, dapat dilihat pada table 4.1 berikut :

1	Semi Basement	280	85	-	-	-
2	Lantai 1	-	-	380	0	-
3	Lantai 2	-	-	170	165	-
4	Pelataran Gedung	-	-	1000	1000	1000

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui dari kapasitas lods pada semi basement dapat menampung 365 orang pedagang dimana lods yang terpakai sebanyak 280 sedangkan lods yang masih kosong sebanyak 85. Pada kapasitas kios lantai 1 dapat menampung 380 orang pedagang, semua kios terpakai yakni 380 kios. Kapasitas kios pada lantai 2 sebanyak 335 orang pedagang, kios terpakai sebanyak 170 sedangkan 165 kios masih kosong. Kapasitas lapak dapat menampung 700 orang pedagang, sehingga jumlah total keseluruhan kapasitas pedagang yang dapat ditampung di Pasar Induk Minasa Maupa sebanyak 2080 orang pedagang.

c. Sejarah Singkat

Pasar Induk Minasa Maupa merupakan pasar tradisional yang dibangun seluas 3 hektar, kemudian pada tahun 2009 di era kepemimpinan Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo pasar ini mengalami

perombakan dan pembangunan kembali, dengan memakan waktu selama empat tahun.

Proses pembangunannya memakan waktu yang cukup lama dikarenakan Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo tidak ingin para pedagang membayar biaya lods dengan harga tinggi. Dan menunggu perbandingan harga lods dari pasar di daerah lain. Pasar ini di dibangun dengan tujuan mampu menjadi pusat perdagangan yang ada di Kabupaten Gowa dan mampu menampung relokasi pedagang-pedagang yang lain mulai dari pedagan palapara (kaki lima), Pasar Sentral Sungguminasa yang telah terbakar serta pasar daruruat lainnya.

d. Sarana dan Prasarana

Pasar Induk Minasa Maupa dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 3 hektar dengan bangunan pasar sebesar 40% dari luas tanah atau sekitar 1,2 hektar terdiri dari 2 lantai yang mampu menampung 3000 lebih pedagang. Pasar Induk Minasa Maupa memiliki berbagai fasilitas sebagai berikut:

- 1) Kios 1106
- 2) Lods 930
- 3) Lapak 1000+
- 4) Lahan parkir sebesar 50% dari luas tanah atau setara dengan 1,5 hektar
- 5) Aula
- 6) Mushollah
- 7) WC 9 bagian (2-5 WC/bagian), dan Cafe dan Food Court.

B. Kapabilitas Governance dalam Pengembangan Pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa Kabupaten Gowa

Untuk mengetahui kapabilitas *governance* dalam pengembangan pasar induk Minasa Maupa Sungguminasa Kabupaten Gowa melalui aspek berikut ini :

1. Berfikir ke depan (*thinking ahead*)

Yaitu merupakan kemampuan institusi pemerintah untuk mengidentifikasi perkembangan lingkungan dan kebutuhan masyarakat dimasa depan, memahami implikasinya terhadap aktivitas dalam pencapaian tujuan organisasi serta mengidentifikasi berbagai strategi dan pilihan yang dibutuhkan untuk mengantisipasinya. Seperti yang dikatakan Kepala Pasar Induk Minasa Maupa bahwa :

“Strategi yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan pasar induk Minasa Maupa diantaranya dengan mendorong para pedagang distributor untuk langsung memasarkan barangnya kepada konsumen. Jadi itu akan menekan harga barang sehingga tidak didapati harga yang melambung yang ada dipasar. Pemerintah juga menyiapkan sarana dan prasarana penunjang kepada para pedagang seperti menyediakan lokasi bongkar muat, menyediakan lokasi parkir yang luas, menambah waktu operasional sampai 24 jam untuk transaksi perdagangan. Memberikan kemudahan akses masuk ke dalam pasar, tidak membebankan pungutan terhadap pedagang kecuali yang sudah disepakati, memberikan jaminan kepada para pedagang.”(hasil wawancara dengan ZL, tanggal 18 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan dapat diketahui bahwa langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah yaitu dalam bentuk strategi pemerintah dalam mengembangkan pasar induk Minasa Maupa yang mengedepankan pentingnya pengawasan dan kenyamanan para pedagang.

Wawancara penulis dengan Kepala Bidang Bina Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa terkait pedagang di pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa sebagai berikut :

“Persoalan pedagang banyak yang berjualan diluar merupakan persoalan kebiasaan oleh pedagang. Budaya pedagang memang begitu selalu mau dekat dengan konsumen. Seringkali diadakan penertiban tapi pedagang tetap selalu mengulang lagi kebiasaannya berdagang diluar.” (hasil wawancara dengan MA, tanggal 18 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa berdagang diluar pasar merupakan budaya atau kebiasaan sehingga meskipun sudah ditertibkan tapi pedagang tetap selalu mengulang lagi kebiasaannya karena tujuannya agar terlihat oleh konsumen, mereka ingin dekat dan mudah di jangkau oleh konsumen.

Berikut ini adalah wawancara penulis dengan Muh. Arzad selaku pedagang konsumen di pasar induk Minasa Maupa mengungkapkan bahwa :

“Pemerintah menyediakan lokasi bongkar muat, lokasi parkir yang luas, tidak membebankan pungutan terhadap pedagang diluar yang disepakati, memberikan jaminan kepada para pedagang sehingga kami dapat berjualan dengan nyaman tanpa beban.” (hasil wawancara dengan AR, tanggal 18 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa demi kenyamanan pedagang pemerintah selalu memberikan yang terbaik dengan menyediakan lokasi untuk aktifitas bongkar muat, lokasi parkir yang luas, dengan tidak membebankan pungutan terhadap pedagang diluar yang disepakati. Hal ini sangat membantu pedagang dalam menjalankan kegiatan berdagangnya.

Hal ini dibenarkan oleh Dg. Saing selaku pedagang di pasar induk

Minasa Maupa mengatakan bahwa :

“Terkait fasilitas pedagang di pasar sejauh ini pemerintah sudah mengayomi kami dengan baik, hanya saja permasalahan yang pedagang khususnya pedagang yang berjual di dalam pasar itu kadang tidak tersentuh konsumen, konsumen lebih sering belanja di luar pasar”. (hasil wawancara dengan DS, tanggal 18 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan dapat diketahui bahwa pemerintah selalu mengedepankan keamanan dan kenyamanan para pedagang dengan menyiapkan setiap keperluan pedagang dalam melancarkan proses perdagangannya. Namun meskipun demikian masih ada ada masalah lain bagi pedagang khususnya yang berdagang didalam pasar karena jarang tersentuh oleh konsumen dikarenakan konsumen yang lebih sering berbelanja di luar pasar.

Berikut hasil wawancara dengan Hj. Lino selaku konsumen di pasar induk Minasa Maupa terkait kebiasaan konsumen belanja di luar mengungkapkan bahwa :

“Kita sebagai pembeli mengunjungi pedagang yang mudah dijangkau. Jadi kalau ada penjual di luar buat apa lagi jauh-jauh jalan masuk ke pasar” (hasil wawancara dengan LN, tanggal 18 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan dapat diketahui bahwa budaya pedagang yang selalu ingin dekat dengan konsumen salah satu faktor penyebab banyaknya berdagang diluar pasar sehingga menyebabkan banyaknya lods didalam pasar yang tidak terpakai.

Berdasarkan hasil wawancara dari Hj. Nani selaku konsumen di pasar induk Minasa Maupa mengatakan bahwa :

“Konsumen adalah raja atau ratu. Ibarat raja dan ratu tentu pembeli tidak mau repot makanya cari yang mudah dijangkau”. (hasil wawancara dengan NN, tanggal 18 Februari 2021).

Berdasarkan wawancara dengan informan diketahui bahwa dalam dunia perdagangan, konsumen sangat berperan penting serta memiliki pengaruh besar dalam perkembangan pasar.

Pada penelitian diperoleh gambaran bahwa langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Gowa merupakan bagian dari komponen berfikir ke depan terlihat dari strategi pengembangan pasar induk Minasa Maupa dengan mendorong para pedagang distributor memasarkan langsung barang dagangannya kepada konsumen serta mengedepankan keamanan, kenyamanan dan pengawasan para pedagang. Namun indikator pemahaman pencapaian tujuan belum dapat dikatakan dapat dipahami secara menyeluruh di Pasar Induk Minasa Maupa karena persoalan pedagang yang banyak berjualan atau membuka lapak diluar pasar dengan alasan ingin dekat atau terlihat oleh, konsumen, budaya pedagang selalu ingin dekat dengan konsumen. Seringkali dilakukan penertiban, akan tetapi pedagang mengulang lagi kebiasaan mereka berdagang di luar. Hal ini mengakibatkan pasar menjadi semakin padat dan banyaknya lods atau kios didalam pasar yang tidak terpakai.

2. Berpikir Lagi (*Thinking Again*)

Yaitu kemampuan institusi untuk memanfaatkan data aktual, informasi, pengukuran dan umpan balik terhadap masalah yang menghambat kinerja, meninjau berbagai turunan kebijakan dan program dari

masa lalu untuk dicari jalan perbaikan kinerjanya. Seperti yang dikatakan Kepala Pasar Induk Minasa Maupa bahwa :

“Untuk permasalahan lods yang tidak terisi dan banyaknya penjual yang berjualan di luar pasar. Penjual yang berjualan diluar pasar itu diatur dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang berjual diluar pasar adalah sebagian dari mereka yang berjual di area basement seperti bahan sayur, rempah dan campuran.” (hasil wawancara dengan ZL, tanggal 18 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan dapat diketahui bahwa hasil tinjauan yang dilakukan pemerintah masih kesulitan dalam menangani para pedagang yang berjual di luar pasar padahal masih banyak kios kosong. Sehingga menuntun pemerintah mengatur jadwal operasi pedagang yang berjual di luar pasar.

Dalam hal yang sama pula untuk pengembangan pasar, Kepala Bidang Bina Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa menyatakan bahwa :

“Pemerintah seharusnya dalam hal ini dinas yang membawahi tentang perbaikan sarana dan prasarana jalan dan lebih memperhatikan situasi dan kondisi yang ada didalam pasar. Jadi perhatian itu supaya lebih diutamakan supaya aktifitas jual beli berjalan lancar.” (hasil wawancara dengan MA, tanggal 18 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa sarana dan prasarana merupakan indikator penting yang harus diperhatikan pemerintah dalam mengembangkan pasar induk Minasa Maupa karena kondisi akses jalan menuju pasar merupakan faktor utama berkembangnya sebuah pasar agar pedagang dan konsumen nyaman dengan kondisi pasar sehingga aktifitas jual beli berjalan lancar.

Hal ini dibenarkan oleh Muh. Arzad selaku pedagang konsumen di pasar induk Minasa Maupa mengatakan :

“Banyak konsumen yang mengeluhkan kondisi jalan masuk ke area pasar. Saya berharap pemerintah terkait dapat segera memperbaiki sarana jalan di area pasar ini agar konsumen lebih tertarik lagi berbelanja di pasar ini”. (hasil wawancara dengan MA, tanggal 18 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa faktor yang melatar belakangi perkembangan pasar adalah sarana dan prasarana. Tata kelola pasar diharapkan mengembangkan pasar tradisonal. Seperti yang dikatakan oleh Muh. Arzad, salah satu pedagang Pasar Induk Minasa Maupa terkait berdagang di luar pasar bahwa :

“Alasan kami menjual diluar dan tidak mau masuk ke dalam gedung itu tidak ada lods untuk penjual sayuran, kotor, dan sepi pembeli. Biasanya konsumen cari yang di luar, tidak jauh jalan masuk.” (hasil wawancara dengan AR, tanggal 18 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan dapat diketahui bahwa pasar induk Minasa Maupa kurang efektif dalam menyediakan lods untuk pedagang sayuran. Kondisi pasar dan budaya konsumen yang mendorong banyaknya pedagang yang berjual diluar.

Berikut hasil wawancara dengan Hj. Nani selaku konsumen terkait akses jalan menuju pasar Pasar Induk Minasa Maupa :

“Akses jalan ke pasar sangat kotor, becek. Itu salah satu alasan malas berlama-lama dan lebih memilih berbelanja di pedagang luar pasar”. (hasil wawancara dengan NN, tanggal 18 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa dalam pengembangan pasar akses jalan menuju pasar harus diperhatikan. Akses jalan yang kotor akan menyebabkan konsumen malas mendatangi pasar

sehingga lebih memilih berbelanja dipedagang di luar pasar. Hal inilah yang mengakibatkan pedagang di dalam pasar jarang tersentuh oleh konsumen.

Hal ini dibenarkan oleh Hj. Nani selaku konsumen di pasar Induk Minasa Maupa mengatakan bahwa :

“Setiap hari konsumen yang datang ke pasar banyak tapi karena akses jalan masuk pasar jelek, kebanyakan konsumen berbelanja di luar pasar untuk menghindari jalanan yang rusak dan becek”. (hasil wawancara dengan NN, tanggal 18 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan dapat diketahui bahwa dalam mengembangkan sebuah pasar, maka sangat penting bagi pemerintah atau dinas terkait untuk lebih memperhatikan sarana dan prasarana jalan serta kondisi yang ada didalam pasar.

Pada penelitian diperoleh gambaran bahwa pada variabel berpikir lagi (*thinking again*) menunjukkan bahwa adanya hasil tinjauan dari kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Gowa yaitu permasalahan lods yang tidak terisi, perbaikan sarana dan prasarana dan banyaknya penjual yang berjualan di luar pasar diatur dengan jadwal operasi pedagang yang sudah ditentukan. Akses jalan menuju pasar atau gedung perlu diperbaiki agar aktifitas jual beli berjalan lancar karena kondisi jalan yang jelek dan kotor membuat konsumen malas memasuki area pasar dan lebih memilih berbelanja dipedagang yang membuka lapak di luar pasar. Peninjauan dilakukan dengan memaksimal pendataan dan mengupdate kembali pasar Induk Minasa Maupa dengan melakukan kunjungan rutin untuk melihat kondisi pasar dan meninjau aktifitas jual beli disana. Kemudian indikator mendesain ulang pengembangan pasar tradisional dapat dilakukan

pemerintah secara sinergis dengan tidak terlepas dari strategi pengembangan pasar tradisional lainnya yang difokuskan pada empat aspek pengelolaan, yaitu permasalahan banyak lods kosong, banyaknya pedagang yang berjualan di luar pasar, dan perbaikan sarana dan prasarana.

Selanjutnya indikator menjalankan system baru sebagai bagian terakhir dari variabel berpikir lagi (*thinking again*) menjelaskan adanya strategi dalam pengembangan pasar perlu didukung oleh partisipasi aktif pemerintah, pengelola pasar dan pedagang. Pemerintah atau dinas terkait yang membawahi sarana dan prasarana lebih memperhatikan situasi dan kondisi di dalam pasar, pengelola pasar harus lebih ketat menertibkan pedagang-pedagang yang berjualan di luar pasar serta kesadaran pedagang untuk tidak berjualan di luar pasar agar konsumen berbelanja di dalam pasar.

3. Berpikir lintas batas (*thinking across*)

Yaitu kemampuan organisasi melintasi batas-batas tradisional untuk belajar dari pengalaman orang lain sehingga gagasan baru dapat diaopsi dan memungkinkan kebijakan dan program baru yang inovatif dicoba dan dilembagakan. Seperti yang dikatakan Kepala Pasar Induk Minasa Maupa menyatakan bahwa :

“Selanjutnya agar pemerintah segera menyediakan ATM yang ada di dalam pasar karena besar sekali peranannya dalam menunjang perputaran keuangan.” (hasil wawancara dengan ZL, tanggal 18 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan dapat diketahui bahwa dalam mengembangkan sebuah pasar, alat penunjang keuangan masih terbatas sehingga pemerintah sebaiknya fokus kepada penyediaan fasilitas

berupa ATM untuk kelancaran perputaran keuangan dalam ruang lingkup Pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa.

Namun demikian harus dilakukan upaya agar pasar Induk Minasa Maupa menjadi pasar yang berkembang sesuai harapan dan memiliki penataan yang lebih baik mengingat lokasi pasar ini ditengah kota Sungguminasa.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bina Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa terkait solusi pedagang yang berjualan di luar pasar sebagai berikut :

“Untuk mengakomodir permasalahan pedagang yang berjualan diluar pasar kita berencana akan membangun pasar Bontorea di daerah Pallangga untuk menampung semua pedagang, kita arahkan semua pedagang dipinggir jalan untuk berdagang disitu. Pasar itu dibuka dengan model lods terbuka”, (hasil wawancara dengan MA, tanggal 18 Februari 2021).

Hal ini didukung oleh para pedagang Pasar Induk Minasa Maupa karena dengan rencana tersebut maka penataan pasar semakin tertata, tidak ada lagi pedagang yang berjualan di luar sehingga pedagang yang berjualan di dalam pasar bisa tersentuh oleh pembeli. Seperti yang dikatakan Muh. Arzad, selaku pedagang pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa :

“Saya sangat berharap rencana pembangunan pasar Bontorea cepat terealisasi agar pedagang yang berjualan di luar bisa pindah kesitu. Dengan begitu konsumen akan berbelanja di dalam pasar”. (hasil wawancara dengan AR, tanggal 18 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan dapat diketahui bahwa solusi yang diambil pemerintah yakni pembangunan pasar Bontorea di Pallangga yang dapat difungsikan dengan baik dan penataan pasar dengan

sebaik-baiknya agar antara pedagang, konsumen dan pemerintah saling bersinergi dalam mengembangkan pasar Induk Minasa Maupa.

Wawancara dengan Dg. Saing selaku pedagang di pasar induk Minasa Maupa terkait penyediaan mesin ATM sebagai berikut:

“Sangat penting adanya mesin ATM disini karena banyak konsumen yang mau belanja tapi tidak atau habis ada uang tunainya dan akhirnya batal membeli”. (hasil wawancara dengan DS, tanggal 18 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan dapat diketahui bahwa pasar induk Minasa Maupa belum menyediakan fasilitas mesin ATM sehingga banyak konsumen yang mengeluh apabila kehabisan uang tunai. Hal ini juga merugikan pedagang karena transaksi jual beli tidak lancar atau kadang batal.

Hal ini dibenarkan oleh Hj. Lino selaku konsumen di pasar induk Minasa Maupa mengatakan bahwa:

“Kadang masih belanja tapi kehabisan uang tunai dan ATM juga tidak ada. Seharusnya untuk pasar sebesar itu disediakan ATM agar memudahkan konsumen”. (hasil wawancara dengan LN, tanggal 18 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan dapat diketahui bahwa pentingnya menyediakan mesin ATM dalam menunjang proses jual beli di pasar Induk Minasa Maupa agar berjalan lancar. Saat ini teknologi teknologi semakin maju sehingga fasilitas mesin ATM sangat diperlukan di lokasi pasar induk Minasa Maupa.

Berikut hasil wawancara dengan Hj. Nani selaku konsumen di pasar induk Minasa Maupa terkait solusi pedagang yang berjualan di luar pasar sebagai berikut :

“Saya sangat berharap pemerintah segera memberikan solusi untuk masalah tersebut karena selain merugikan pedagang yang berlapak di dalam pasar juga sangat mengganggu kenyamanan dalam berbelanja karena terlalu padat.”. (hasil wawancara dengan NN, tanggal 18 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan dapat diketahui bahwa pentingnya pemerintah segera membangun pasar alternatif untuk mengatasi masalah pedagang yang berjual di luar pasar Induk Minasa Sungguminasa.

Pada penelitian ini diperoleh gambaran pada variabel berpikir lintas batas (*thinking across*) menunjukkan bahwa indikator adopsi dapat dilakukan dengan mengikuti pola yang digambarkan oleh daerah lain seperti di Yogyakarta yaitu dengan membangun pasar alternatif di lokasi lain. Selanjutnya indikator evaluasi yang perlu diperkuat adalah komitmen bersama untuk mengembangkan pasar induk Minasa Maupa Sungguminasa Kabupaten Gowa. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Gowa untuk mengakomodir permasalahan pedagang yang berjual diluar pasar maka berencana akan membangun pasar alternatif Bontorea di Kecamatan Pallangga dengan model lods terbuka, sehingga pedagang yang berjual di pinggir jalan akan diarahkan kesana dan konsumen di pasar Induk Minasa Maupa akan kembali berbelanja di dalam pasar. Selain itu, pemerintah menyediakan fasilitas yang dapat menunjang kelancaran transaksi jual beli,

seperti ATM karena peranannya sangat besar terutama dalam pertukaran keuangan.

Selanjutnya indikator penyesuaian yang merupakan bagian dari variabel berpikir lintas batas (*thinking across*) menunjukkan perlunya sosialisasi pada publik mengenai pentingnya menjaga keseimbangan dan keberlangsungan pasar disamping itu penyesuaian juga perlu mempertimbangkan sinergitas antara pemerintah dan pedagang melalui serangkaian program dapat memberikan kontribusi pada pengembangan pasar induk Minasa Maupa.

Pada akhirnya penelitian ini menjelaskan adanya vertical system dalam pengembangan pasar induk Minasa Maupa perlu didukung oleh partisipasi aktif pemerintah, pengelola pasar dan pedagang. Pemerintah lebih memperhatikan kondisi sarana dan prasarana pasar serta membangun pasar alternatif untuk mengantisipasi banyaknya pedagang yang berjual di luar pasar. Tim pengelola pasar lebih ketat dalam menertibkan pedagang yang berjual di luar pasar. Dan pedagang harus menaati jadwal berjual di luar pasar sesuai peraturan yang sudah ditentukan dan disepakati bersama.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengembangan Pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa Kabupaten Gowa

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam pengembangan pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa Kabupaten Gowa sangat penting karena dengan adanya faktor pendukung tersebut pengembangan Pasar Induk Minasa Maupa dapat berjalan dengan optimal sesuai yang. Faktor-faktor pengembangan pasar

Induk Minasa Maupa Sungguminasa Kabupaten Gowa terdiri dari beberapa elemen atau unsur yang ada di masyarakat baik alam maupun sumber daya manusianya itu sendiri. Seperti yang dikatakan Kepala Pasar Induk Minasa Maupa menyatakan bahwa :

“Pemerintah membangun pasar ini didorong berbagai faktor sebagaimana pasar pada umumnya. Semua fasilitas lengkap dan semua pedagang dan pengunjung tidak kesulitan, seperti WC umum, pusat informasi dan lain-lain.” (hasil wawancara dengan ZL, tanggal 18 Februari 2021).

Maka dari itu harus dilakukan penguatan-penguatan agar dari pendukung yang sudah ada bisa lebih dikembangkan lagi khususnya dengan membina pedagang dan masyarakat agar dapat sesuai dengan harapan yakni terwujudnya pengembangan Pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa Kabupaten Gowa. Seperti yang dikatakan Kepala Bidang Bina Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa menyatakan bahwa :

“Pengetahuan pengelola pasar dalam hal ini kepala pasar induk Minasa Maupa sangat pintar dalam menginterpretasikan keinginan pemerintah dalam pengembangan pasar. Pengetahuan dan pengalamannya pengelola pasar sangat baik dan luas”. (hasil wawancara dengan MA, tanggal 18 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa wawasan dan pengetahuan dari pengelola pasar sangat berperan penting dalam pengembangan pasar induk Minasa Maupa. Melalui wawasan yang luas, maka pengelola pasar mampu menginterpretasikan keinginan pemerintah dalam pengembangan pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muh. Arzad selaku pedagang di pasar Induk Minasa Maupa mengatakan bahwa:

“Tim pengelola pasar selalu berupaya memberikan yang terbaik kepada pedagang, mulai dari fasilitas umum, penerangan dan akses informasi. Tim pengelola pasar selalu mengelola dengan baik sehingga kami para pedagang selalu dapat berjualan dengan nyaman”. (hasil wawancara dengan AR, tanggal 18 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa dalam memberikan kenyamanan tim pengelola pasar menyediakan fasilitas yang dibutuhkan pedagang dan konsumen. Tim pengelola pasar memberikan yang terbaik kepada pedaga dan konsumen. Dengan menyediakan fasilitas di dalam pasar, maka pedagang maupun konsumen dapat beraktifitas dengan baik dan nyaman.

Hal ini dibenarkan oleh Dg. Saing yakni salah satu pedagang Pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa:

“Tim pengelola pasar sangat support dalam mengembangkan pasar ini, kami yang ada didalam gedung ini merasa sangat puas dengan langkah dan hasil kerja dari tim kinerja pengelola pasar”. (hasil wawancara dengan DS, tanggal 18 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa secara garis besar faktor pendukung pengembangan pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa Kabupaten Gowa yaitu menyedikan fasilitas umum, penerangan, pusat informasi, akses informasi harga yang terbuka dan kinerja tim pengelola pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj. Lino yakni salah satu konsumen Pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa mengatakan bahwa:

“Salah satu keunggulan pasar ini dibanding pasar lain di Sungguminasa adalah fasilitas umum yang tersedia. Apalagi di lantai 2 toiletnya bersih dan tidak bau”. (hasil wawancara dengan LN, tanggal 18 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tersedianya fasilitas umum merupakan keunggulan utama di pasar induk Minasa Maupa karena selain fasilitasnya lengkap, juga kebersihannya. Tim pengelola pasar sangat mengutamakan kebersihan fasilitas terutama toiletnya yang bersih dan tidak bau sehingga pedagang dan konsumen nyaman menggunakan fasilitas yang tersedia.

Hal ini dibenarkan oleh Hj. Nani yakni salah satu konsumen Pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa :

“Saya suka berbelanja di pasar Induk Minasa Maupa karena bersih dan tersedia fasilitas umum ”. (hasil wawancara dengan NN, tanggal 18 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan dapat diketahui bahwa dalam mengembangkan pasar Induk Minasa Maupa membutuhkan beberapa dukungan agar pasar semakin maju dan berkembang. Faktor paling utama adalah kinerja tim pengelola pasar karena mereka yang paling berperan dalam mengembangkan pasar induk minasa maupa.

Pada penelitian diketahui bahwa dalam pengembangan pasar induk Minasa Maupa tidak lepas dari dorongan atau dukungan dari berbagai aspek. Dukungan inilah yang akan membantu jalannya setiap strategi atau program yang dilaksanakan pemerintah sehingga dapat berjalan dengan baik dan efektif. Pengembangan pasar induk Minasa Maupa dapat berjalan dengan optimal sesuai yang diharapkan karena didukung oleh tersedianya fasilitas umum, penerangan, pusat informasi, akses informasi harga yang terbuka, dan kinerja tim pengelola pasar. Dari kelima indikator ini, kinerja

tim pengelola pasar merupakan faktor yang paling utama karena paling berperan dalam mengembangkan pasar induk minasa maupa.

2. Faktor Penghambat

Selain memiliki faktor pendukung dalam pengembangan pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa Kabupaten Gowa, dalam kenyataannya juga memiliki berbagai faktor penghambat yang sering menghambat dalam proses kegiatan ini.

Adapun faktor yang menjadi penghambat pengembangan pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa Kabupaten Gowa yaitu akses perbankan belum ada (ATM), daya tampung pasar padat dikarenakan banyaknya pedagang dan karakter pedagang yang selalu ingin berdagang diluar pasar

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pasar Induk Minasa Maupa menyatakan bahwa :

“Salah satu kekurangan pasar ini belum ada mesin ATM padahal itu kan sangat berperan penting bagi perputaran transaksi di pasar. Saran saya semoga pemerintah terkait bisa membantu pengadaan fasilitas mesin ATM.” (hasil wawancara dengan ZL, tanggal 18 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa mesin ATM merupakan kekurangan dari pasar induk Minasa Maupa. Tidak tersedianya fasilitas mesin ATM sangat mengganggu perputaran transaksi jual beli di pasar. Sehingga pengelola, pedagang dan konsumen sangat berharap agar pemerintah dapat segera menyediakan mesin ATM di lokasi pasar Induk Minasa Maupa.

Kepala Bidang Bina Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa tak menyangkal jika pasar Induk Minasa Maupa saat ini dalam pengembangan masih banyak memiliki kekurangan yang perlu ditinjau kembali, ia menyatakan bahwa :

“Karakter pedagang yang selalu mau dekat dengan pedagang sehingga pedagang banyak berjual diluar pasar. Selalu mau kelihatan makanya tidak mau di area tertutup”. (hasil wawancara dengan MA, tanggal 18 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa karakter pedagang merupakan faktor yang menghambat pengembangan pasar. Karakter pedagang yang selalu ingin terlihat dan dekat dengan konsumen sehingga mereka memilih membuka lapak di luar pasar dan mengakibatkan pekarangan pasar kotor dan sangat padat sementara di dalam pasar banyak lods yang kosong.

Berikut hasil wawancara dengan Muh. Arzad selaku pedagang di pasar induk Minasa Maupa terkait belum adanya aksesoris perbankan (Mesin ATM) mengatakan bahwa :

“Kadang kecewa karena ada pembeli yang membeli di lods kami tapi batal karena uang tunai kurang. Sementara ATM di area pasar belum ada”. (hasil wawancara dengan AR, tanggal 18 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa karena tidak tersedianya mesin ATM seringkali memberikan kekecewaan kepada pedagang karena menjadi penghambat jalannya transaksi jual beli di lapak mereka karena persoalan kekurangan uang tunai dan akses mesin ATM yang tersedia jauh dari lokasi pasar. Sehingga perlunya pemerintah dengan

cepat menyediakan fasilitas mesin ATM demi kenyamanan transaksi jual beli di pasar.

Hal ini dibenarkan oleh Dg. Saing, selaku pedagang di pasar induk Minasa Maupa mengatakan bahwa :

“Saya berharap pemerintah segera menyediakan mesin ATM. Karena biasanya banyak pembeli yang cari ATM”. (hasil wawancara dengan DS, tanggal 18 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan dapat diketahui bahwa pedagang sangat berharap pemerintah segera menyediakan mesin ATM untuk kelancaran transaksi jual beli antara pedagang dan konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj. Lino yakni salah satu konsumen di pasar induk Minasa Maupa terkait daya tampung pasar yang padat karena banyaknya pedagang mengatakan bahwa :

“Pekarangan pasar padat pedagang sehingga pasar menjadi kotor dan becek. Hal ini karena banyak pedagang yang berjualan di luar. Karena padatnya pedagang di luar, kadang kita mau masuk pasar tapi tidak bisa”. (hasil wawancara dengan LN, tanggal 18 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa kondisi pasar yang padat merupakan faktor yang menghambat pengembangan pasar induk Minasa Maupa. Karena padatnya pedagang di luar mengakibatkan banyak konsumen tidak bisa masuk ke dalam pasar sehingga lebih memilih berbelanja di luar pasar. Kondisi ini yang mengakibatkan pasar semakin kotor dan akses ke dalam pasar semakin buruk dan mengganggu kenyamanan konsumen.

Hal ini dibenarkan oleh Hj. Nani yakni salah satu konsumen di pasar induk Minasa Maupa mengatakan bahwa :

“Pasar setiap hari padat, selain karena pengunjung/konsumen yang banyak juga karena pasar dan pekarangannya dipenuhi lapak pedagang yang berjualan. Hal tersebut yang menyebabkan pasar setiap harinya padat”. (hasil wawancara dengan LN, tanggal 18 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan dapat diketahui bahwa pengembangan pasar Induk Minasa Maupa masih terhalang oleh fasilitas mesin ATM dan karakter pedagang yang beragam. Seiring jalannya waktu mesin ATM sangat berperan penting bagi perputaran keuangan. Sama halnya dengan karakter pedagang, mereka yang selalu ingin dekat dengan konsumen agar dilihat tentu mengambil tindakan yang salah yaitu berjualan di luar pasar atau di pinggir jalan. Hal inilah yang menjadi permasalahan yang perlu kita cari solusinya agar Pasar Induk Minasa Maupa dapat berkembang dengan baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, peneliti mengemukakan :

1. *Capability governance* yang ditunjukkan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa : (a) *thinking ahead* yaitu budaya pedagang yang selalu ingin dekat dengan konsumen salah satu faktor penyebab banyaknya berdagang diluar pasar sehingga menyebabkan banyaknya lods didalam pasar yang tidak terpakai. (b) *thinking again* yaitu pemerintah masih kesulitan dalam menangani para pedagang yang berjual di luar pasar padahal masih banyak kios kosong. Sehingga menuntun pemerintah mengatur jadwal operasi pedagang yang berjual di luar pasar. (c) *thinking across* yaitu strategi pemerintah dalam pengembangan pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa, pemahaman pencapaian tujuan belum dapat dikatakan dapat dipahami secara menyeluruh namun opsi startegi yang dapat dimunculkan dalam penelitian ini yaitu membangun pasar Bontorea di daerah Pallangga dengan ruang atau lods terbuka untuk mengantisipasi masalah pedagang yang berjual di luar pasar karena ingin dilihat atau dekat dengan konsumen.
2. Faktor pendukung pengembangan pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa Kabupaten Gowa diantaranya : (1) Menyediakan fasilitas umum, (2) Penerangan, (3) Pusat Informasi, (4) Akses Informasi harga yang terbuka dan (5) Kinerja Tim Pengelola pasar.

3. Faktor yang menjadi penghambat pengembangan pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa Kabupaten Gowa yaitu : (a) Akses perbankan belum ada (ATM), (b) Daya tampung pasar padat dikarenakan banyaknya pedagang dan (c) Karakter pedagang yang selalu ingin berdagang diluar pasar.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan *Kapabilitas Governance* dalam Pengembangan Pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa Kabupaten Gowa, maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah dan dinas terkait lebih memperhatikan kondisi dan situasi Pasar Induk Minasa Maupa, seperti kondisi dalam pasar dan kondisi jalan akses menuju pasar.
2. Pemerintah mengupayakan pembangunan pasar dengan ruang atau lods terbuka untuk para pedagang dengan yang berjual diluar pasar atau dipinggir jalan.
3. Pemerintah menyediakan fasilitas mesin ATM untuk menunjang perputaran keuangan di pasar Induk Minasa Maupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah. 2014. *Dynamic Governance (Kerangka Konseptual Melembagakan Budaya, Kapabilitas, dan Perubahan)*. Jurnal Kebangsaan Volume 9 Nomor 1 Maret 2014. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Yudharta Pasuruan.
- Anoraga, Pandji, *Manajemen Bisnis* (Cetakan keempat), Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2009.
- Anwar, Rozan. 2009. *Pengembangan Model tentang Pengaruh Able People dan Agile Process terhadap Dynamic Capabilities dalam Proses Kebijakan Publik (Studi Kasus Pelayanan Bidang Pendidikan di Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali)*. (Disertasi) Fisip Ilmu Administrasi. Depok : Universitas Indonesia
- Edralin, JS. (1997). *The New Local Governance and Capacity Building: A Strategic Approach*. Regional Development, Vol. 25 (7), hal. 1029-1043.
- Fauzi, L. M. (2019). *Strategi Dynamic Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat*. *Statistical Field Theor*, 53(9), 1689-1699.
- Helfat, C. E. (2006). *Dynamic capabilities: understanding strategic change in organizations*. Malden, MA: Blackwell Pub.
- Hetifa, Sumarto Sj. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Kazim, Azhar, dkk. 2015. *Merekonstruksi Indonesia : Sebuah Perjalanan Menuju Dynamic Governance*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara
- Keban, Y. T. (2000). *Good Governance dan Capacity Building sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan*. *Universitas Gajah Mada*, 20, 1-12.
https://www.bappenas.go.id/files/8214/0288/3124/yeremias_20091015151431_2389_0.pdf
- Makassar, D. I. K. (2017). *Kapabilitas Dynamic Governance Dalam*. 3(1), 1-13.
- Miles, M dan Huberman, A.M. 2007. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Neo, Boon Siong & Chen, Geraldine, 2007. *Dyanmic Governance: Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore*, Singapore: World Scientific Publishing
- Nugroho, B. A. A., & Nurcahyanto, H. (2016). *Strategi Pengembangan Pasar Tradisional di Kota Semarang*. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(1), 1–11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/10431/10133>
- Pratiwi, S, 2012. *Analisis Pasar Wisata Syariah di Kota Yogyakarta*. *Jurnal Media Wisata*, Vol. 14, No 1
- Pohan, Chairil Anwar. (2014). *Pembahasan Komprehensif PERPAJAKAN INDONESIA Teori dan Kasus*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Putra, Fitriano. 2020. "Kapabilitas *Dynamic Governance* Dalam Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 –2017". *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Volume 04. No. 02. Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Padjadjaran.
- Sedarmayanti, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Rafika Aditama
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukaatmadja, I. P. G., Nyoman, N., Yasa, K., & Rahyuda, H. (2015). *Strategi Pengembangan Pasar Tradisional Berbasis Kearifan Lokal Untuk Mengentaskan Kemiskinan Di Bali*. *Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 8(2), 121–129.
- Sunyoto, Danang. 2012. *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran*, Yogyakarta: CAPS, 2012.
- Tahir, Arifin. 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta : PT. Pustaka Indonesia Press
- Teguh, Ambar. 2011. *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Gava Media

Tuah Fitriano Putra, D. (2020). *Kapabilitas Dynamic Governance Dalam Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 -- 2017*. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 144–176. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v4i2.1460>

United Nations Development Programme, 2002. *UNDP and Governance for Sustainable Human Development* (New York: UNDP policy paper, 2002).
Lihat juga Goh Ban Lee, *Non-Compliance: A Neglected Agenda in Urban Governance* (Kuala Lumpur: Institute Sultan Iskandar, 2002), pp.218-27.

Widodo, Joko. 2008. *Good Governance : Telaah Dan Dimensi Akuntabilitas Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Surabaya : Instan Cendikia.

PP No.11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN sebagai turunan dari UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 06 tahun 2016 tentang pengelolaan pasar tradisional



LAMPIRAN :**DAFTAR PERTANYAAN**

1. Bagaimana kapabilitas goovernance dalam pengembangan pasar induk Minasa Maupa Sungguminasa?
2. Bagaimana strategi pemerintah dalam pengembangan pasar induk Minasa Maupa Sungguminasa?
3. Faktor apa yang menjadi mendukung dalam pengembangan pasar induk Minasa Maupa Sungguminasa?
4. Faktor apa yang menjadi menghambat dalam pengembangan pasar induk Minasa Maupa Sungguminasa?



DOKUMENTASI WAWANCARA







RIWAYAT HIDUP



Abd. Rahman., Lahir pada tanggal 19 Agustus 1996, di Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, dari pasangan Rustam dan Johoria. Penulis Pertama kali masuk Pendidikan di SD Inpres Parang-Parang pada tahun 2002 dan tamat pada tahun 2008. Melanjutkan Pendidikan di SMP Muhammadiyah Limbung pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2011.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke SMA Negeri 1 Palilangga yang sekarang berubah jadi SMA Negeri 9 Gowa dan tamat pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru. Pada tahun 2021 penulis mendapat gelar S.1 jurusan ilmu Pemerintahan dengan judul Capability Governance dalam pengembangan pasar induk Minasa Maupa di Sungguminasa di Kabupaten Gowa. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan penulis dapat mengimplementasikan di masyarakat apa yang penulis dapat dari selama belajar di Universitas Muhammadiyah Makassar.